

GAIRAH KEBERAGAMAAN DI KALANGAN MINORITAS MUSLIM NEGARA OTORITER SEKULER SINGAPURA*

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

A. Latar Belakang

Muslim Singapura adalah kelompok minoritas di negara multi-etnis dan multiagama.¹ Penduduknya berjumlah 5.612.300 jiwa.² Mayoritas penduduknya, yaitu 74.3% adalah etnis China. Etnis Melayu tergolong minoritas, yaitu 13.4% dari seluruh jumlah penduduk. Berikutnya etnis India mencapai 9.0%, Arab, Pakistan dan lainnya 3.2%.³ Dari segi penganut agama, Muslim hanya berjumlah 14% dimana 13.4% di antaranya adalah Melayu, dan lainnya berasal dari India, Arab dan Pakistan. Sisanya terdiri dari 43.2 % penganut Budha dan Tao; 18.8% penganut Kristen; 18.5% tanpa agama; 5.0% penganut Hindu, dan lain-lainnya 0.5%.⁴ Dengan komposisi seperti itu, Muslim Singapura adalah minoritas yang hidup di kalangan masyarakat multikultural dan multireligius.

Disamping itu, beberapa peneliti,⁵ 'Human Right Watch' dan 'Amnesty International', mengklasifikasikan Singapura sebagai negara otoriter. Hal ini terindikasi dari pemberlakuan sejumlah undang-undang dan kebijakan administratif seperti 'Internal Security Act, Societies Act' dan 'Sédition Act' yang membatasi hak konstitusional dan sipil Muslim. Regulasi tersebut membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat; menolak hak proses hukum; memberlakukan hukum pencemaran nama baik; kontrol yang ketat terhadap kegiatan politik independen, serta menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan perkara kritik terhadap

• Penelitian pada LPPM UIN Suska Riau, tahun 2019.

¹ . Robert W. Hefner, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2001).

² . Department of Statistics Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore, *Population Trends*, dalam file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/population2018.pdf

³ . Department of Statistics Singapore, *Singapore in Figures 2018*, Diunduh tanggal 31 Agustus 2018 melalui: <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/reference/sif2018.pdf>

⁴ . Department Statistics Singapore 2015, *Executive Summary*, hlm. 2. Diakses pada 31 Agustus 2018. Melalui <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/ghs/ghs2015/executive-summary.pdf>

⁵ . Seperti Lily Zubaidah Rahim, dalam *Governing Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*, working paper No. 156, Asia Research Centre, Juli 2009. hlm. 7; Mathews Mathew, *Understanding Religious Freedom in Singapore*, *Journal Review of Faith & International Affairs*, Volume 11, 2013 - Issue 2; Walid Jumblatt Abdullah, *Religious Representation in Secular Singapore: A Study of MUIS and Pergas*, Thesis at Department of Political Science, National University of Singapore, 2012.

pemerintah.⁶ Internal Security Act (ISA) adalah undang-undang keamanan dalam negeri Singapura yang mengizinkan penahanan terhadap tersangka secara berkepanjangan tanpa proses pengadilan. The Straits Times melansir ada 64 orang yang telah ditahan sejak Januari 2002 hingga awal 2013 berdasarkan Undang-undang ISA karena dituduh terlibat dalam kegiatan terorisme.⁷ Meski secara signifikan telah diktitik oleh badan-badan internasional seperti International Commission of Jurists, Amnesty International, Asia Watch dan Human Right Watch karena kegagalannya menyesuaikan dengan hukum internasional, pemerintah Singapura tetap memberlakukan undang-undang dan kebijakan administratif ini.

Selain itu, pemerintah memproklamirkan bahwa Singapura adalah negara sekuler.⁸ Laporan Komisi Konstitusi tahun 1966 menegaskan Singapura sebagai “democratic secular state”⁹ Perdana Menteri, Lee Hsien Loong, juga menegaskan hal yang sama pada National Day Rally Speech tahun 2009 bahwa “the government has to remain secular”.¹⁰ Ini menegaskan bahwa negara bersikap netral terkait urusan agama; tidak mendorong warga negaranya untuk memeluk agama atau tidak beragama.¹¹ Negara tidak mengurus dan mengatur agama dan menempatkannya sebagai urusan pribadi setiap individu. Namun demikian, Menteri Informasi, Komunikasi dan Seni, George Yeo, menambahkan: “Singapore’s government is secular, but it is certainly not atheistic. It is neutral”.¹² Sikap ini memperlihatkan bahwa pemerintah menganut paham sekularisme strategis, yang secara tegas menyatakan bahwa sekuler tidaklah bermakna tidak bertuhan (atheis) mengingat dalam realitasnya lebih dari 90% warga negara ini memeluk agama tertentu. Kebijakan otoritarianisme dan sekularisme strategis Singapura menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh untuk memastikan batasan-batasan dalam hal mana negara terlibat dalam urusan agama dan sebaliknya melihat tingkat kebebasan

⁶ . Human Right Watch, Country Summary, Singapore, January 2009, diakses tanggal 19 Maret 2018 dari http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Singapore; Amnesty International Report 2009, May 2009 <http://www.amnesty.org>

⁷ . The Straits Times, 8 March 2013 dalam Rizwana Abdul Azeez, Creating a Modern Singapore Muslim Community: A Tale of Language Dissonance, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014), hlm. 2, diakses dari https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/iseas_working_papers_2014_2.pdf

⁸ . Kamaludeen Mohammed Nasir, Alexius A. Pereira, & Bryan S. Turner, Muslim In Singapore: Piety, Politics and Policies, (New York: Routledge, 2010), hlm. 2

⁹ . Report of the Constitutional Commission, 1966 (Chairman: Wee Chong Jin), Singapore: Printed by the Government Printer, 1966), OCLC51640681. Para.38.

¹⁰ . Prime Minister Lee Hsien Loong’s National Day Rally Speech 2009 on 16 August (transcript), tersedia di <https://www.pmo.gov.sg/newsroom/prime-minister-lee-hsien-loongs-national-day-rally-2009speech-english>. Diakses tanggal 10 September 2018.

¹¹ . John T. S. Madeley and Zsolt Enyedi, Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality, (Routledge, 2003).

¹² . Lily Zubaidah Rahim, Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore’s Secular Authoritarian State, working paper No. 156, Asia Research Centre, Juli 2009, hlm. 2.

beragama bagi warga negaranya serta sejauh mana agama diberi ruang untuk berfungsi di ruang publik.

Pandangan dan sikap otoriter-sekularistik pemerintah nampaknya berimplikasi pada beberapa kebijakannya, seperti yang melarang komunitas agama terlibat dalam kegiatan politik dengan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum. Selain itu, kebijakan-kebijakannya juga kurang sensitif terhadap kepentingan Muslim. Misalnya, tidak dibenarkan mengumandangkan suara azan menggunakan loud speaker untuk memanggil Muslim menunaikan shalat, kecuali di Mesjid Sultan yang merupakan salah satu mesjid tertua dan bersejarah di negara itu. Alasan pemerintah adalah agar tidak mengganggu non-Muslim yang mayoritas. Pelarangan bagi siswi Muslim memakai jilbab (tudung kepala) di sekolah-sekolah negeri adalah contoh lain kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif terhadap kepentingan Muslim. Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura menegaskan alasannya dengan mengatakan; "Hijab was not part of the school uniforms and effectively banned in institutions of learning". Putra Lee Kuan Yew itu kembali menegaskan alasannya kepada Berita Harian, Malay Newspaper, bahwa tudung kepala dinilai sebagai identitas dan simbol agama tertentu. Memperbolehkan Muslimah memakainya di institusi pendidikan akan mengganggu integrasi dan harmoni sosial, karena akan menyebabkan kurangnya interaksi antar siswa yang berbeda agama, siswa terkotak-kotak, serta memunculkan kegusaran di kalangan siswa non-Muslim. Pegawai Muslimah sebelumnya juga pernah dilarang memakai jilbab ketika bertugas di institusi-institusi negara seperti kantor pemerintah, rumah sakit, dll.¹³

Di samping itu, berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menempatkan pendidikan agama sebagai sub sistem pendidikan nasional, pemerintah Singapura bersikap sebaliknya. Dulu, pada tahun 1984, pelajaran agama pernah masuk dalam kurikulum sekolah Singapura dengan durasi 35-45 menit seminggu. Para siswa bebas menentukan pilihan untuk mempelajari satu dari tiga agama yang ditawarkan yakni, Islam, Budha dan Kristen. Namun lima tahun kemudian, kebijakan tersebut diganti. Seperti ditegaskannya bahwa agama merupakan urusan pribadi dan tidak menjadi urusan sekolah maupun negara. Kebijakan yang sama dilanjutkan oleh Perdana Menteri berikutnya, Lee Hsien Loong dimana pelajaran agama tidak masuk dalam kurikulum sekolah. Ketika Perdana Menteri tersebut dikonfirmasi mengenai berita akan ada perubahan kebijakan pemerintah terkait pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri, ia menjawab, "Kami telah menetapkan bahwa Singapura adalah sebuah negara sekuler, karena itu maka agama merupakan suatu hal yang sebaiknya

¹³ . "Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore", Islam Online-net. <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013.

dibiarkan berada dalam kawasan pribadi.”¹⁴ Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga membatasi jumlah madrasah dan penerimaan siswa di madrasah dengan alasan bahwa negara tidak memerlukan banyak warganya untuk menjadi imam, ustadz dan ahli agama lainnya.

Seperti di negara-negara sekuler lainnya, kebijakan pemerintah tidak sensitif pada kepentingan Muslim dan penegakan syi’ar Islam. Kebijakan pemerintah terkait New Strait Settelement (penataan tempat tinggal) adalah salah satu contohnya.¹⁵ Karena lajunya arus urbanisasi dan migrasi global di negara kecil ini, dan dalam rangka asimilasi dan integrasi antar warga yang berbeda ras dan agama, pemerintah membuat kebijakan pembangunan flat (rumah susun). Semua penduduk diwajibkan menetap disana, termasuk Muslim. Saat ini lebih kurang 85% warga negara Singapura tinggal di flat tersebut. Pemerintah memberlakukan kuota pada setiap komplek perumahan secara proporsional sesuai dengan persentase jumlah warga berdasarkan etnis di negara itu yang antara lain mencakup etnis Cina, India dan Melayu. Melayu Muslim yang tadinya homogen dari sisi etnis dan agama, terpaksa pindah dari kampung tradisional mereka ke tempat tinggal modern yang multietnik dan multireligius. Kebijakan pemerintah ini berpengaruh secara signifikan, terutama bagi Muslim. Sebelumnya mereka tinggal dengan saudara-saudara seimannya di kampung secara homogen baik dari segi etnis, budaya, bahasa maupun agama, dan dapat menikmati pelaksanaan ajaran dan syiar Islam secara berjamaah, sekarang mereka terpaksa menyebar ke berbagai komplek perumahan (flat) yang berbeda-beda. Karena kebijakan tersebut, mereka jadi terpisah dari jama’ah dan komunitas agama yang sudah terkondisi secara alami. Mereka tidak lagi dapat menikmati ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan secara bersama-sama, seperti meriahnya perayaan hari besar Islam, dan kajian-kajian keagamaan. Tidak lagi mudah bagi mereka untuk mempererat ukhuwah dan silaturahmi, karena sudah terpecah ke lokasi apartemen yang terpisah. Mereka mesti membaur dengan pemeluk agama dan etnis lainnya di tempat tinggal yang baru. Komposisi Muslim yang minoritas di setiap komplek perumahan tidak memotivasi terbentuknya perhimpunan keagamaan seperti sebelumnya saat mereka tinggal di kampung tradisionalnya yang homogen. Konsekuensinya syiar Islam terasa makin lemah.

Beberapa persoalan yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa tidaklah mudah bagi minoritas Muslim Singapura yang hidup dalam masyarakat plural dan multikultural dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan sekuler untuk terus menghidupkan gairah keberagaman, memelihara dan melestarikan warisan sejarah dan peradaban Islam serta melestarikan budaya Melayu yang telah diwarnai

¹⁴. “Belajar dari Cara Singapura Memperlakukan Agama” dalam Detikforum, Politik dan Peristiwa Sosial Budaya, 13 Agustus 2014. Diakses dari <http://forum.detik.com/belajar-dari-cara-singapore-memperlakukan-agama-t1001623.html>

¹⁵. Chua Beng Huat, *Political Legitimacy and Housing, Stake holding in Singapore*, (New York: Taylor & Francis e-Library, 2002).

oleh ajaran Islam yang dianutnya. Kondisi sebagaimana telah digambarkan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi minoritas Muslim Singapura dalam mengamalkan ajaran agamanya. Namun demikian, beberapa fakta --sebagaimana dilansir oleh berbagai media-- memperlihatkan gairah yang tinggi dalam pengamalan Islam di kalangan minoritas Muslim Singapura seperti ketertarikan banyak anak muda untuk tunaikan haji,¹⁶ kenaikan penerimaan sumbangan wajib Muslim untuk pembangunan mesjid,¹⁷ berpartisipasi aktif dalam penyaluran dana untuk kemanusiaan dan solidaritas sosial,¹⁸ peningkatan geliat zakat¹⁹, peningkatan jumlah jemaah haji dan umrah, dan intensitas penyelenggaraan pendidikan Islam formal dan non formal.²⁰ Hal ini menarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana minoritas Muslim ini merekonsiliasikan antara keunikan kondisi mereka dengan pengamalan Islam serta bagaimana mereka memupuk gairah keberagamaannya itu. Pengalaman mereka diharapkan dapat mengilhami dan menginspirasi kaum Muslim di belahan bumi lainnya --khususnya Indonesia-- dalam menggairahkan kehidupan beragama.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dasar pemikiran sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik “sekuler” dan “otoriter” negara Singapura?
2. Bagaimana minoritas Muslim Singapura merekonsiliasikan antara keunikan kondisi mereka yang hidup dalam masyarakat multikultural di sebuah negara otoriter-sekuler dengan pengamalan Islam ?
3. Bagaimana gairah keberagamaan di kalangan minoritas Muslim Singapura serta upaya mereka dalam memelihara dan melestarikan peradaban Islam ?
4. Bagaimana minoritas Muslim Singapura memupuk gairah keberagamaan dalam keunikan kondisi mereka di negara sekuler Singapura?

C. Kerangka Teori

Salah satu tujuan penelitian ini adalah menyelidiki tentang gairah keberagamaan minoritas Muslim Singapura. Gairah artinya “keinginan, hasrat atau

¹⁶ . <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/07/24/pcdlcg384-banyakmuslim-muda-singapura-tertarik-berhaji>, diakses tanggal 10 September 2019.

¹⁷ . <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/03/17/o45ygv313-sumbangan-wajibmuslim-singapura-alami-kenaikan>, diakses tanggal 10 September 2019.

¹⁸ . <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/09/09/nuddn3313-muslim-singapurasalurkan-2-ton-beras-untuk-dhuafa-di-aceh>, dan <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/14/10/07/nd1mx9-muslim-singapura-pilih-salurkan-daging-kurban-ke-luar-negeri>, diakses tanggal 10 September 2019.

¹⁹ <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/04/29/mm097i-geliat-zakat-disingapura-meningkat>, diakses tanggal 10 September 2019.

²⁰ . Helmiati, Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura, (Laporan penelitian, LPPM UIN Suska Riau, 2014).

keberanian yang kuat”²¹. Gairah merupakan salah satu elemen pokok yang meringankan upaya dan mengubah aktivitas yang biasa-biasa saja menjadi suatu pekerjaan yang dapat dinikmati. Sedangkan “keberagamaan” adalah komitmen religius (yang berkaitan dengan agama atau keyakinan iman) yang dapat terlihat dari perilaku dan aktivitas seseorang sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya. Banyak yang berpendapat bahwa inti dari keberagamaan adalah komitmen. Dengan demikian, gairah keberagamaan adalah keinginan dan hasrat yang kuat dalam merealisasikan komitmen dan ketaatan beragama yang menurut para ahli dapat dilihat dari beberapa dimensi.

Ada banyak perdebatan tentang sifat serta isi dari komitmen keberagamaan. Ada yang memandang bahwa keberagamaan pada dasarnya adalah pengalaman spiritual yang sifatnya sangat intim dan tidak dapat diterima untuk studi empiris yang objektif. Menurut mereka, keberagamaan terlalu sulit untuk diamati, didokumentasikan, dipelajari dan dianalisis. Keberagamaan dengan demikian, dipandang memiliki beragam makna dan mempunyai berbagai dimensi. Selain itu, salah satu klaim utama dalam debat ini adalah bahwa keberagamaan dibuktikan melalui kognitif, perilaku, dan etika.

Meski diakui terdapat variasi besar pada ekspresi keberagamaan antar agama yang satu dengan yang lainnya, menurut Stark dan Glock, ada juga konsensus mengenai bagaimana berbagai agama di dunia harus diamalkan. Dalam kajian sosiologis, para ahli sependapat bahwa keberagamaan bersifat multi dimensi bukan fenomena uni-dimensi.²² Ini berarti bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara agama dapat diekspresikan, serta dalam tingkat intensitas ia dipraktikkan. Para ahli mencoba menjawab tantangan bagaimana mengidentifikasi dimensi-dimensi keberagamaan yang berbeda dan mengukurnya secara metodologis.

Von Hugel mengidentifikasi tiga dimensi keberagamaan yaitu dimensi tradisional, dimensi rasional, dan dimensi intuitif dan volisional. Pratt mengidentifikasi empat dimensi keberagamaan yang terdiri dari dimensi tradisional, dimensi rasional, dimensi mistik, dan dimensi praktikal (moral).²³ Memperkuat temuan para ahli sebelumnya, seperti von Hugel dan Pratt, Stark dan Glock mengidentifikasi lima dimensi inti keberagamaan yaitu dimensi ideologis, dimensi ritual, dimensi pengalaman (experiential), dimensi intelektual/devosi, dan dimensi konsekuensi (consequential).²⁴ Penelitian ini cenderung menggunakan teori Stark dan

²¹. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 326.

²². R Stack dan C.Y. Glock, *American Piety, and the Nature of Religious Commitment*, (Berkeley: University of California, 1968); J.E. Faulkner dan G.F. De Jong, *Religiosity in 5-D: An Empirical Analysis*, *Social Forces*, 45: 246-254.

²³. Dalam Riaz Hassan, *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society*, (terj. Jajang Jaahroni, dkk.), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 46.

²⁴. R Stack dan C.Y. Glock, *American Piety, and the Nature of Religious Commitment*.

Golk. Berikut penjelasan dari masing-masing dimensi keberagamaan menurut Stark dan Glock.

1. Dimensi Ideologis

Dimensi ideologis terdiri dari seperangkat kepercayaan yang wajib diyakini dan diimani oleh seorang Muslim. Riaz Hassan menjelaskan sebagai berikut:

“Seperti agama lainnya, struktur kepercayaan Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama berkaitan dengan iman kepada tuhan beserta segala sifat-sifatNya. Bagian kedua menjelaskan tentang tujuan tuhan dan peran orang mukmin dalam tujuan tersebut. Bagian ketiga menjelaskan tentang dasar etika agama. Dalam wacana sosiologi, kepercayaan ini seringkali disebut sebagai iman yang shahih (*warranting belief*), iman yang memiliki tujuan (*purposive belief*), dan iman yang diamalkan (*implementing belief*)”.²⁵

Point ini memfokuskan pada pokok kepercayaan yang diyakini oleh kaum Muslim. Sebagian besar pokok-pokok kepercayaan diketahui berdasarkan teks-teks keislaman. Kepercayaan yang paling sering disebut, dan karena itu dipilih untuk mengetahui daya tarik dan intensitas gairah dimensi ideologis, yaitu percaya kepada Allah, percaya pada hari akhir, percaya hanya orang yang iman pada Nabi Muhammad yang masuk sorga, percaya pada adanya setan/iblis, dan percaya pada mukjizat Alquran. Semua ini adalah kepercayaan yang asasi dan tujuan Iman.

2. Dimensi Ritual

Ritual adalah bagian integral dari agama formal. Ia terdiri dari praktik agama seperti ibadah, pemujaan, pengabdian, dan hal-hal yang dipraktekkan orang untuk menjalankan komitmen agama mereka dalam rangka melaksanakan ajaran agamanya.²⁶ Semua agama mempunyai ritual, doa, puja-puji, dan ibadahnya. Dalam perspektif sosiologis, ritual agama dipandang berperan penting dalam menegakkan dan memelihara identitas, institusi, dan komunitas agama.²⁷

Analisis ritual agama menurut Riaz Hassan dapat dilakukan paling tidak melalui dua cara:

“Pertama, dengan membedakan individu dalam hal frekuensi mereka melakukan aktivitas ritual, dan kedua, memfokuska pada makna ritual bagi individu yang melakukannya. Analisis yang dilakukan di sini akan memfokuskan pada cara yang pertama, namun juga berusaha untuk membahas pertanyaan tentang makna”.²⁸

²⁵. Riaz Hassan, *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society*, hlm. 49.

²⁶. R Stack dan C.Y. Glock, *American Piety, and the Nature of Religious Commitment*, hlm. 15.

²⁷. Chaterine Bell, *Ritual: Perspectives and Dimensions*, (New York: Oxford University Press, 1997).

²⁸. Riaz Hassan, *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society*, hlm. 50.

Islam adalah agama yang memiliki banyak ritual. Muslim berkewajiban melakukan ritual-ritual tertentu sebagai ekspresi keyakinannya. Ritual-ritual seperti wudhu', shalat lima waktu, puasa, haji, menjadi hal penting dalam membangun keberagamaan di kalangan umat Islam. Frekuensi melakukan ritual menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesalehan atau keberagamaan seseorang. Jadi, ritual yang dipilih dalam studi ini adalah pelaksanaan shalat lima waktu; puasa Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan menunaikan haji. Analisis diutamakan pada frekuensi dan keteraturan pelaksanaannya. Asumsi yang dianut antara lain adalah bahwa ritual-ritual ini saling terkait pada tingkat individu maupun kelompok.

3. Dimensi Pengalaman (*experiential*)

Ini merupakan dimensi kognitif agama.

“Ia mencakup perasaan, pengetahuan, dan emosi yang timbul dari, atau berhubungan dengan tipe-tipe komunikasi dengan, atau pengalaman-pengalaman dari, hakikat ketuhanan yang paling tinggi. Pengalaman-pengalaman ini pada umumnya berwujud di sekitar ide tentang pemahaman, kognisi, kepercayaan, iman, atau rasa takut”.²⁹

Dimensi ini secara bervariasi melibatkan perasaan subjektif, sensasi, atau visi yang berasal dari hubungan yang diyakini oleh seseorang berasal dari kekuatan supranatural. Pengalaman agama menghasilkan saat-saat yang dipahami oleh orang-orang yang mengalaminya sebagai pertemuan, kontak dan dialog antara mereka dengan kekuatan ghaib.³⁰

4. Dimensi Intelektual dan Devosi

Stark dan Glock memaknai devosi keagamaan sebagai sebuah dimensi komitmen keagamaan. Perbedaan antara devosi dan ritual adalah ritual bersifat formal dan publik, sementara devosi bersifat personal dan kontemplatif. Dalam Islam, orang dibolehkan shalat sendiri-sendiri, yang bukan kewajiban formal agama. Salah satu bentuk devosi yang bersifat pribadi dan spontan bagi umat Islam adalah komitmen mereka terhadap Alquran dan keyakinan bahwa ajaran Alquran merupakan petunjuk baik bagi manusia. Karena itu orang Islam mencari petunjuk dari Alquran untuk mengatasi masalah kehidupannya. Dalam studi ini responden ditanya seberapa jauh Alquran membantu dalam membuat keputusan terkait pemanfaatan waktu, bagaimana bergaul dengan orang lain, dan bagaimana mendidik anak-anak mereka.

5. Dimensi Konsekuensi (*consequential*)

²⁹. R Stack dan C.Y. Glock, *American Piety, and the Nature of Religious Commitment*, hlm. 31.

³⁰. Riaz Hassan, *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society*, hlm. 52.

Semua agama menaruh perhatian atas pengaruhnya terhadap para pemeluknya dan kehidupan mereka sehari-hari. Sejumlah agama menekankan hal ini lebih eksplisit dibanding agama lainnya.

“Dalam Islam, penyerahan diri pada nilai-nilai agama dipandang sebagai cara utama untuk memperoleh pahala di dunia dan keselamatan di akhirat. Pahala kadang langsung dibalas dengan segera, dan ini mencakup hal-hal seperti ketengangan jiwa, perasaan damai, kebahagiaan diri, dan bahkan kesuksesan materi dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga memperingatkan adanya konsekuensi bila manusia tidak mengikuti ajaran dan perintah agama. Contohnya, Islam sangat menekankan pentingnya iman kepada Allah dan bahwa kehidupan ini adalah ciptaanNya. Orang yang tidak percaya dianggap kafir, mereka mendapatkan siksa yang abadi”.

Kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Stack dan Glock tak jauh berbeda dengan pandangan umum Muslim tentang agama dan keberagamaan. Secara tradisional, istilah agama dipahami Muslim mengacu pada seluruh aspek terkait hubungan antara manusia dengan figur yang bersifat transenden. Agama juga didefinisikan sebagai representasi berbagai aktifitas dan jalan hidup (the way of life) individu. Sehingga, agama tidak saja terkait dengan hal yang transenden yang jauh di luar sana, melainkan juga dimensi di dalam dan sekitar kehidupan manusia itu sendiri.³¹

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian: kuantitatif dan kualitatif, mengingat ada permasalahan penelitian seperti intensitas gairah keberagamaan yang memerlukan pengambilan data numerik yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik serta pengukuran hasil menggunakan analisis statistik. Sementara itu permasalahan penelitian lainnya bersifat kualitatif yang mengharuskan peneliti selaku instrument pokok taat asas pada paradigma kualitatif dimana upaya kuantifikasi atau analisis statistik seperti pada penelitian kuantitatif tidak digunakan pada laporan hasil penelitian. Jenis penelitian yang kedua ini dipilih mengingat penelitian ini juga memiliki permasalahan yang dinamis, penuh makna, terikat nilai dan sangat kompleks. Data pada situasi sosial yang dinamis, kompleks dan permasalahannya yang belum jelas seperti ini tidak mungkin dapat dikumpulkan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di Negara Singapura, tepatnya pada birokrasi agama yang disponsori negara, antara lain Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) atau Dewan Agama Islam di satu sisi, dan pimpinan organisasi Islam Islamic Scholar Association of Singapore (Pergas), institusi pendidikan Andalus dan jamaah mesjid Sultan di sisi lain. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tehnik

³¹ . Ibid. .

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Yang primer dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari beberapa sumber yang beragam, misalnya dari Pusat Data Statistik, hasil riset/jurnal, referensi, dan lain-lain. Untuk menguji validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, dari beberapa teknik pengumpulan data, dan dari peneliti atau pengamat lain agar diperoleh data dengan tingkat kepercayaan yang meyakinkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana halnya penelitian kualitatif, data tidak dianalisis hanya secara linear, tetapi dengan cara menggunakan interactive analysis, yang biasa juga dikenal dengan cyclical interactive analysis model. Dalam pelaksanaannya, model ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan. Seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dan diinterpretasi, untuk diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif.

E. Karakteristik Sekuler dan Otoriter Singapura

E.1. Tinjauan Historis Sekularisme Singapura

Sekularisme Singapura dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarahnya yang unik yang dialaminya pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, tepatnya sebelum kemerdekaannya pada tahun 1965. Tiga peristiwa historis yang timbul dari politik berbasis ras dan agama telah membentuk karakteristik negara baru Singapura. Peristiwa pertama adalah kerusuhan Maria Hertogh pada tahun 1950, yang melibatkan pergumulan antara orang tua kandungnya yang beragama Katolik Belanda dan ibu angkat Melayu-Muslimnya untuk penahanan Maria Hertogh. Delapan belas orang tewas dan 173 lainnya terluka. Konflik ini dipicu oleh faktor-faktor etnis dan agama dan diatur dengan latar belakang politik anti-kolonial. Yang kedua adalah kerusuhan komunal pada bulan Juli 1964, yang terjadi selama perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kerusuhan itu dipicu ketika pemuda Cina melempari orang-orang Muslim yang terlibat dalam prosesi itu. Selanjutnya, 22 orang tewas dan 454 menderita luka-luka. Memang, agama adalah faktor penting, mengingat sifat dari perayaan itu. Ketiga, penggabungan singkat antara Singapura dan Malaysia, dari tahun 1963 hingga 1965, memunculkan perbedaan yang tidak dapat dipertemukan antara para pemimpin kedua negara sehubungan dengan bagaimana ras dan agama harus dikelola sebagai faktor-faktor untuk mengatur masyarakat. Tiga pengalaman historis yang tragis ini membuat pemerintah berkesimpulan bahwa etnisitas dan agama adalah dua faktor yang dapat menghancurkan tatanan sosial masyarakat multi-etnis dan multi-agama.

Pengalaman menyakitkan elit penguasa terkait politik ras dan agama sebelum dan selama penggabungan politik singkat dengan Malaysia membentuk pandangan dunia mereka serta ideologi yang menjadi dasar pendirian negara baru, berlandaskan

pada dua pilar - multikulturalisme dan sekularisme. Diputuskan bahwa agama tidak boleh ditampilkan dalam kehidupan nasional, meskipun Konstitusi Singapura menjamin kebebasan beragama.³² Sementara multikulturalisme menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menegaskan identitas budaya dan agama mereka, sekularisme memoderasi situasi dan menahan agama dengan cara mengecualikannya dari ranah publik dan politik.³³ Lee Kuan Yew (pendiri Singapura modern) menegaskan kembali keyakinannya pada sekularisme dengan mengatakan bahwa agama tidak bisa menjadi kekuatan bagi persatuan nasional. Dalam masyarakat yang multi agama dan multi etnis seperti Singapura, sekularisme sangat penting untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama”, seperti ditegaskannya: “Religion cannot be a force for national unity. Indeed, secularism is essential for inter-religious harmony for our multi-religious community”³⁴

Meski ada deklarasi pemerintah terkait sekulerisme yang dianut Negara Singapura, konsep sekularisme yang digunakan pemerintah terutama dalam penerapannya terhadap komunitas Muslim dan dalam mengelola Islam nampaknya berbeda. Ada versi yang berbeda dari 'sekularisme Singapura'. Selain itu, tidak sedikit yang menilai Singapura sebagai negara otoriter. Bagaimanakah karakteristik sekuler dan otoriter negara sekuler? Bab ini bertujuan menyajikan sejumlah data dan analisis untuk mengidentifikasi karakteristik sekuler dan otoriter negara Singapura.

E.2. Pemerintah Tidak Anti- Islam dan Muslim

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan sikapnya yang mengesankan bahwa pemerintah bukan anti-Islam, juga bukan anti Muslim. Pemerintah bahkan menyatakan sikap positifnya terhadap gairah dan semangat Muslim Singapura dalam meningkatkan keberagamaan dan kesalehan mereka. Goh Chok Tong, saat menjabat Perdana Menteri Singapura misalnya mengatakan:

“There is really nothing wrong with Singaporeans wanting to be more religious, as long as they regard their religion as something personal between themselves and their God, and they interact freely with people of other races and religions”.³⁵

³² . Hussin Mutalib, *Singapore Malays: Being ethnic minority and Muslim in a global city-state*, (London: Routledge, 2012), hlm. 139-140.

³³ . Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “International Religious Freedom Report,” (U.S: Department of State, 2009), available at: www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/.

³⁴ . Lee Kuan Yew, *The Wit and Wisdom of Lee Kuan Yew*, Singapore: Editions Didier Millet, 2013, 90.

³⁵ . Pidato Goh Chok Tong pada di Parlemen Singapura pada 5 April 2002, diakses dari <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>, pada September 2005

Ini berarti pemerintah menyadari betapa pentingnya mengakui eksistensi komunitas umat beragama dan memperkenankan mereka untuk punya ruang pribadi. Tidak ada yang salah ketika Muslim ingin lebih religius sepanjang mereka menjadikan agama sebagai persoalan pribadi mereka dengan Tuhannya. Namun di samping itu, pemerintah memberikan penekanan pada perlunya ruang bersama dengan kelompok etnis dan pemeluk agama lain. Muslim diharapkan untuk tetap mampu dan mau berinteraksi dan berasimilasi dengan sesama warga negara lainnya tanpa melihat agama maupun ras mereka.

Pada kesempatan lain Goh Chok Tong juga menunjukkan apresiasi pada sebagian besar Muslim Singapura yang bersikap moderat, berpandangan terbuka, dan inklusif, serta mampu berintegrasi dengan sesama warga negara termasuk non-Muslim, dan ini diakui pemerintah berkontribusi dalam menciptakan harmonisasi antar masyarakat multi-ras dan multi-agama. Karena itu, pemerintah merasa tak perlu khawatir terhadap peningkatan kesalehan umat beragama di Singapura, baik pemeluk Islam, Kristen maupun Budha. Karena ia meyakini kesalehan mereka tidak akan mengancam pembangunan. Seperti kata Perdana Menteri, Goh Chok Tong:

“My concern is not the increased piety of our Muslims, our Christian and Buddhists too, are becoming more pious. Being more pious does not mean that they will work against the interests of the country. In fact, the large majority of our Muslims are moderate, open-minded and inclusive. They believe in integration with the other communities, and get along well with our non-Muslims. They have contributed much to building our harmonious multi-racial, multi-religious society.”³⁶

Sikap pemerintah yang tidak anti-Islam dan Muslim juga tercermin dari pernyataan pemerintah dalam “The White Paper” mengenai ‘Jama’ah Islamiyah’ (JI) yang sudah diputuskan oleh Parlemen Singapura, yang menegaskan kembali pemberian hak mengamalkan ajaran Islam bagi Muslim Singapura:

“The government recognizes that in its effort to identify and neutralize radical teachers and foreign terrorist operatives, it must not disrupt the legitimate practices and peaceful activities of the local Muslim community...The vast majority of Muslims are moderate, tolerant and law-abiding, and do not support the actions of the Muslim militants. Although the local Muslim community has shown a trend of increasing religiosity, it does not support violence and terrorism. Muslim community and religious leaders have come out strongly and unequivocally to condemn the 11 September 2001 attacks and the JI Singaporeans must remember that members of JI were a small and isolated group of misguided Muslims with no support from the community. It

³⁶ Pidato Goh Chok Tong pada National Day Rally, 2002, diakses dari <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002081805htm>.

would be tragic if the terrorist attacks and the JI case caused distrust and suspicion between Singaporeans.³⁷

Pemerintah mencermati adanya kebangkitan Islam global. Ada yang bersifat moderat, ada juga yang ekstrimis. Pemerintah secara implisit menginginkan Muslim Singapura lebih bersifat moderat dan progresif.

E.3. Inginan Islam Moderat dan Tolak Islam Politik, Ekstrim & Radikal

Insiden 11 September 2001 dan seterusnya penangkapan sejumlah anggota militan JI turut melatarbelakangi perubahan sikap pemerintah Singapura terhadap Islam dan Muslim. Pemerintah semakin berhasrat akan sikap moderasi beragama di kalangan Muslim. Moderat dalam perspektif pemerintah adalah yang mau berintegrasi dengan komunitas lain dan berinteraksi dengan kelompok lain dalam bingkai masyarakat multi-etnis dan multi agama, seperti dikatakan Goh Chok Tong: "...the large majority of our Muslims are moderate, open-minded and inclusive. They believe in integration with the other communities, and get along well with our non-Muslims. They have contributed much to building our harmonious multi-racial, multi-religious society."³⁸ Selain itu, kelompok moderat menganut modernitas, memiliki semangat ingin tahu dan berusaha memperoleh ilmu-ilmu baru dan terbuka untuk menemukan sesuatu yang baru ("the moderates want to embrace modernity, worldly knowledge and openness").³⁹

Goh Chok Tong lebih jauh menjelaskan ciri-ciri sekuler dan moderasi yang diinginkan pemerintah:

"We the citizens of Singapore, acknowledging that we are a secular society; enjoying freedom to practice our religion; and recognizing that religious harmony is cornerstone of our peace, progress and prosperity; hereby resolve to practice our religion in a manner that; promotes the cohesion and integration of our society; expands the common space of Singaporeans; encourages mutual tolerance, understanding, respect, confidence and trust; fosters stronger bonds across religious communities; and prevents religion from ever being a source of conflict."⁴⁰

³⁷. Ministry of Home Affairs, The White Paper: The Jemaah Islamiyah Arrest and the Threat of Terrorism, 2003, hlm. 22,23.

³⁸ Pidato Goh Chok Tong pada National Day Rally, 2002, diakses dari <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002031703.htm>,

³⁹. Teks Sambutan Goh Chok Tong pada National Day Rally 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002081805.htm>

⁴⁰. Teks Sambutan Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura pada Sesi Dialog Bersama Pemimpin Masyarakat Mengeni Penangkapan anggota Jama'ah Islamiyah, 14 Oktober 2002, di Panggung Kallang, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002101405.htm>

Ada beberapa poin penting dalam pernyataan di atas yang menjadi keinginan pemerintah terkait moderasi beragama. Pertama, agar seluruh rakyat Singapura menerima statusnya sebagai masyarakat sekuler. Kedua, selain menikmati kebebasan beragama, mereka mesti meyakini bahwa keamanan, kemajuan dan kesejahteraan yang dinikmati saat ini tidak lepas dari kontribusi harmonisasi antar umat beragama. Ketiga, untuk itu kohesitas dan integrasi perlu terus dipupuk, memperluas ruang bersama warga negara Singapura, menggalakkan sikap toleransi, saling memahami, saling menghormati, saling mempercayai dan meyakini satu sama lain, mempererat hubungan antar umat beragama, serta mencegah agar agama tidak menjadi sumber konflik.

Yang menarik dari pernyataan di atas adalah penegasan sang Perdana Menteri terkait sekularisme negara dan masyarakat Singapura. Secara implisit hal tersebut mencerminkan kekhawatirannya terhadap mudarnya sifat sekularisme, mengingat pada kesempatan lain ia juga menyatakan keprihatinannya tentang potensi melemahnya sekularisme di negara tetangganya baik Malaysia maupun Indonesia:

“The greatest challenges are in Indonesia, which has the largest Muslim population in the world. Most Indonesian just want to rebuild their nation and live in peace and prosperity. President Megawati is their best bet. She stands for a secular, modern and outward looking Indonesia. She has begun to take action against the terrorist and extremists in Indonesia. But it will be some years before she is able to restore political equilibrium. She has to move cautiously so as not to be outflanked by her opponents. She is the best judge of the pace of her fight against terrorism. She needs and deserves the world’s support.”⁴¹

Kebimbangannya terkait potensi melemahnya sekularisme negara tetangganya, Malaysia seiring dengan menguatnya pengaruh PAS tercermin dalamungkapannya sebagai berikut:

“There is now a political stand-off between UMNO, the dominant Malay party in the ruling alliance, which stands for a modern, more secular Malaysia, and PAS, whose goal is to create an Islamic state, including hudud laws”.⁴²

Pemerintah Singapura sungguh-sungguh dalam mendukung prinsip sekuler sebagai ideologi negara. Karena itu, ia sangat khawatir dan prihatin terhadap mudarnya sekularisme seperti yang ia duga dialami oleh negara-negara

⁴¹ . Teks Sambutan Goh Chok Tong pada Acara 40 tahun Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002112704.htm>

⁴² . Teks pidato Lee Hsien Loong, Wakil Perdana Menteri Singapura di Forum Peringkat Menteri Kent Ridge 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002093001.htm>

tetangganya. Salah satu yang dianggap tantangan dan masalah dalam melestarikan ideologi tersebut adalah Islam politik. Pemerintah tidak hanya khawatir pada pengaruh politik Islam dalam konteks Singapura, tetapi juga dalam konteks regional ASEAN. Seperti pernah dinyatakan Goh Chok Tong:

“Political Islam is therefore a challenge for secular governments, especially in those ASEAN countries with large Muslim population...The rise of political Islam in the region will also hamper the ongoing war against terrorism.”⁴³

Islam politik dinilai sebagai wadah yang subur bagi tumbuhnya ekstrimisme mengatas-namakan Islam, dan melemahkan upaya memerangi terorisme. Konsekuensi lebih jauh adalah bahwa Islam politik dapat menyebabkan konflik dan mengganggu stabilitas nasional bahkan regional. Di dalam White Paper mengenai Jema'ah Islamiyah dinyatakan:

“In countries with significant Muslim populations, Islam has become a powerful political force. Political contenders with Islamic leanings invariably invoke Islam as part of their personal and agenda to bolster their political legitimacy and populist appeal. These trends have fostered a favorable environment for extremist and terrorist acting in the name of Islam, and have created more opportunities for them to spread their radical ideas and recruit new members”.⁴⁴

Kekhawatiran yang serupa tercermin dalam pernyataan Perdana Menteri, Goh Chok Tong: “There will always be a tension between secularism and political Islam in Indonesia”.⁴⁵ Pernyataan Khaw Boon Wan, Menteri Komunikasi dan Kesenian Singapura juga menegaskan kebimbangan yang sama. Ia bahkan menyamakan dampak yang disebabkan oleh Islam politik sama dengan yang dibawa oleh Komunis: “With the rise of Political Islam in our region, this can potentially split ASEAN, instead of uniting it, as communism did”.⁴⁶ Singkatnya, pemerintah menginginkan Muslim Singapura untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung faham sekuler sebagai ideology dan dasar negara dan menjauh dari Islam politik.

Bersamaan dengan misi pemerintah agar Muslim lebih menganut dan mengamalkan Islam moderat, ia juga sangat menolak ekstrimisme, radikalisme dan

⁴³. Teks Sambutan Goh Chok Tong pada Acara 40 tahun Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002112704.htm>

⁴⁴. Ministry of Home Affairs Singapore, The White Paper: The Jemaah Islamiyah Arrest and the Threat of Terrorism, 2003, ms.3.

⁴⁵. Teks Sambutan Goh Chok Tong, pada Acara 40 tahun Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002112704.htm>

⁴⁶. Teks Sambutan Khaw Boon Wan, pada Persidangan Singapura, 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002100301.htm>

militanisme serta menghendaki Muslim Singapura yang moderat juga menolaknya. Goh Chok Tong menegaskan: “What I am even more concerned about, however, is religious activism and extremism”. Ekstrimisme dipandang sebagai problem serius yang secara bersama-sama mesti ditentang oleh pemerintah dan rakyat bahkan oleh seluruh umat Islam. Lee Hsien Loong, saat ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri juga mengatakan: “Extremist Islamic terrorism is a global problem, originating in the Middle East, and spreading to every continent. Southeast Asia is not immune to this threat”.⁴⁷ Di Singapore, pemerintah telah menangkap para ekstrimis Jema’ah Islamiyah dan mengambil sikap yang tegas dengan menggagalkan sejumlah operasi mereka. Informasi ini disampaikan secara jelas kepada masyarakat sehingga Muslim Singapura lainnya tidak perlu merasa dicurigai, dan non Muslim tetap memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Seperti dikatakan Goh Chok Tong:

“In Singapore, with a sizeable Muslim minority, the government has arrested extremists belonging to Jemaah Islamiyah group, and severely disrupted their operations. We have gone beyond security actions and taken pains to explain the problem to the population, so that Muslim Singaporeans do not feel that they are all under a cloud of suspicion, and the non-Muslims do not treat their Muslim fellow citizens any different than before. Muslim community leaders have come together to publicly condemn the extremist as doing great harm to the Muslim community. Their clear and unequivocal collective stand has been enormously helpful in maintaining confidence and avoiding a rupture in racial and religious harmony”.⁴⁸

Goh Chok Tong juga mengapresiasi sikap pimpinan Muslim yang secara terbuka mengutuk para ekstrimis karena telah merusak stabilitas masyarakat. Sikap keras pemerintah terhadap kelompok ekstrimis karena memandang ekstrimisme sebagai bahaya yang dapat merusak hubungan masyarakat Singapura yang multi-religi dan multi-etnis. Karena ekstrimisme dipandang bersifat eksklusif, dan mengambil jarak dengan yang bukan kelompoknya sehingga pada akhirnya dinilai dapat memecah kohesi sosial. Bahkan, menurutnya lebih bahaya lagi ketika para ekstrimis memaksa yang lain mengiuti pandangan mereka. Seperti dikatakan Goh Chok Tong:

“Extremism comes from the expense of inter-racial and inter-religious interaction. It excludes rather than includes. It results in a withdrawal of the practitioner into his own communal cocoon, and in a rejection of others who do

⁴⁷ Teks sambutan Lee Hsien Loong, saat menjadi Wakil Perdana Menteri Singapura pada Forum Fortune Global 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002111301.htm>

⁴⁸ . Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Pembahasan Parlemen mengenai Putusan Presiden Singapura, 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

not share his beliefs. When that happens, the other communities will not only keep their distance, but will also press for greater space of their own. This can break up our social cohesion. Extremism is even more dangerous when the practitioners campaign and compel others to follow their view”.⁴⁹

Karena itu, sikap yang diambil pemerintah Singapura adalah selain menangkap para ekstrimis dan menggagalkan operasi mereka, ke depannya pemerintah juga meminta kepada pihak MUIS dan organisasi-organisasi Islam yang berpengaruh lainnya untuk memimpin dan membimbing masyarakat menjauh dari ekstrimisme, faatisme, intoleransi dan sikap yang tidak fleksibel seperti ditegaskan Goh Chok Tong berikut ini:

“I would like to see our Muslim leaders from MUIS and influential organisations like Jamiyah, Muhammadiyah, Pergas and Perdaus, take the lead in this, and guide the community away from extremism, fanaticism, intolerance and inflexibility. They could, for example, propose ways and means to protect the community from religious teachers who spread extremist views... Moderate Muslims should not allow extremists to set the agenda for them”.⁵⁰

Pemerintah Singapura mengapresiasi kebijakan dan langkah yang diambil Pemerintah Malaysia yang menangkap anggota ekstrimis, membasmi organisasinya, serta mengontrol arus keluar siswa Malaysia yang belajar di madrasah di Pakistan karena diduga dapat memperoleh ide-ide ekstrimis. Lee Hsien Loong mengatakan:

“In Malaysia, with a Muslim majority, the government has acted with dispatch, arresting members of extremist groups and rooting out their organisations. The Malaysian government also controls the outflow of Malaysian students studying in madrasahs in Pakistan, where they may pick up extremist ideas”.⁵¹

Pada saat yang sama, pemerintah Singapura juga menyayangkan sikap pemerintah negara lainnya yang menurutnya masih ragu-ragu dalam menindak para ekstrimis seperti diungkapkan Lee Hsien Loong:

⁴⁹. Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Pembahasan Parlemen mengenai Putusan Presiden Singapura, 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

⁵⁰. Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada National Day Rally 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002081805.htm>

⁵¹. Teks Sambutan Lee Hsien Loong, Wakil PM Singapura, berjudul Developments in Southeast Asia: Singapore's Perspective, di Nomura Securities Singapore Seminar 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002101701.htm>

“This situation is quite unlike that in some other countries, where the government hesitates to act against small extremist groups, for fear that in doing so they will anger a much broader group of sympathizers”.⁵²

Selain ekstrimisme, terorisme juga sangat dikecam oleh pemerintah Singapura bahkan memandangnya lebih buruk dari ekstrimisme. Di White Paper ditegaskan bahwa “terorisme adalah sesuatu yang wajar dikutuk dan perang terhadapnya di level internasional patut disokong”. Pemerintah bertekad menindak tegas terorisme, yang menurutnya berarti melawan tindakan biadab dan kejam yang tidak memperdulikan nyawa orang yang tak berdosa:

“We have taken a strong and unequivocal stand against terrorism. It is the moral thing to do. We have to be on the side of civilized human behavior, and against barbaric and cruel acts which have no regard for innocent lives”.⁵³

Lebih jauh, pemerintah juga memandang Islam militan sebagai masalah serius, sama seperti memandang terorisme. Karena itu menghendaki Muslim yang moderat untuk tidak bersifat militan. Goh Chok Tong menyatakan:

“Even more serious is the security problem we now face –the threat from terrorism and Islamic militancy in the region. September 11 and the Jemaah Islamiyah arrests exposed this grave and immediate threat to Singapore...So you see, it is not just Al-Qaeda we are concerned with. It is militant Islam in our region”.⁵⁴

Radikalisme adalah masalah lain yang juga dipandang serius oleh pemerintah. Karena menurut perspektif pemerintah, radikalisme dalam kelompok Islam punya kecenderungan menggunakan terorisme sebagai sarana untuk melakukan kekerasan. Seperti dikatakan Lee Hsien Loong: “Within the wider Islamic religious and political revival, there are radical factions who use terrorism and violence in the name of Islam”.⁵⁵ Senada dengan Lee Hsien Loong, Goh Chok Tong juga melihat hubungan radikalisme dan kelompok ekstrimis. Ia khawatir kelompok ekstrimis akan mengeksploitasi kesadaran Islam yang sedang tumbuh di Singapura maupun kawasan

⁵² Teks Sambutan Lee Hsien Loong, Wakil PM Singapura pada Forum Peringkat Menteri Kent Ridge 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002093001.htm>

⁵³ . Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Sesi Dialog Bersama Pemimpin dan Anggota Kesatuan Sekerja dan Para Majikan, 2001 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2001101403.htm>

⁵⁴ . Teks Sambutan Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura di Parlemen mengenai Utusan Presiden Singapura, 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

⁵⁵ . Teks sambutan Lee Hsien Loong, saat menjadi Wakil Perdana Menteri Singapura pada Forum Fortune Global 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002111301.htm>

Asia untuk mencapai tujuan agama dan politik mereka melalui cara-cara radikal: “My worry is that extremist group will exploit the growing Islamic consciousness in Singapore and in the region, to advance their religious or political objectives through radical means”.⁵⁶

Yang membuat perbedaan antara kelompok moderat dan kelompok ekstrimis sesungguhnya menurut pandangan pemerintah adalah masalah interpretasi terhadap ajaran Islam. Kelompok moderat menganut modernitas, memiliki semangat ingin tahu dan berusaha memperoleh ilmu-ilmu baru dan terbuka untuk menemukan sesuatu yang baru sementara kelompok ekstrimis mengadopsi interpretasi Islam yang sempit dan kaku, seperti dikatakan oleh Gog Chok Tong: “The moderates want to embrace modernity, worldly knowledge and openness, while the extremists want to adopt a narrow and rigid interpretation of Islam”.⁵⁷

E.4. Menerapkan Kebijakan Multikultural

Sesuai dengan ideologi sekularisme yang dianut oleh pemerintah, agama tidaklah menjadi perhatian utama pemerintah Singapura. Mengapa kemudian terlihat ada beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan tidak pro-Islam, menurut Mohd Yunos:

“Lebih disebabkan oleh kebijakan multirasikulturalisme yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan harmoni antar warga negara yang musti ras dan multi etnik, bukan karena masalah agama itu sendiri atau karena keyakinannya terhadap agama tertentu dan cenderung mengabaikan agama lain.”⁵⁸

Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dr. Syaifuddin:

“Sesungguhnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap pemeluk agama manapun. Kesan sikap tidak mendukung pemerintah terhadap ajaran/ kegiatan agama tertentu bukan karena agama itu sendiri tetapi lebih pada kebijakan multirasialisme / multikulturalismenya yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan asimilasi antar warga. Seperti larangan menggunakan tudung bagi siswa Muslim, lebih karena menjaga integrasi nasional dan menghindari munculnya divisi-divisi di kalangan siswa. Begitu juga kebijakan pemerintah terkait penataan tempat tinggal, selain dimaksudkan untuk penataan kota juga dimaksudkan untuk menjaga agar terjadi integrasi dan asimilasi

⁵⁶ . Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Pembahasan Parlemen mengenai Putusan Presiden Singapura, 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

⁵⁷ . Teks Sambutan Goh Chok Tong pada National Day Rally 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002081805.htm>

⁵⁸ . Wawancara dengan Mr Mohd Yunos Mohd Syariff, Vice President II Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore.

antar agama dan etnis yang berbeda. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud stabilitas sosial. Selain itu batasan-batasan tertentu atau penyesuaian tidak hanya dikenakan pada Melayu/pemeluk Islam, tetapi juga kepada etnis /pemeluk agama lainnya. Penganut ajaran Taoist juga tidak dibolehkan membakar colok saat menyambut perayaan di tempat-tempat terbuka. Jumlah dan ukuran colok dikurangi dan aktivitas membakar colok hanya di dibolehkan di tokong.⁵⁹

Singapura memang telah dikenal di seluruh dunia sebagai negara multiras yang kuat. Sejak meraih kemerdekaan, elit politik yang berkuasa telah menerapkan kebijakan multikulturalisme/multirasialisme. Multirasialisme menurut definisi Benjamin, adalah "ideologi yang memberikan status yang sama pada budaya dan berbagai identitas dari berbagai 'ras' yang terdiri dari masyarakat majemuk”⁶⁰

Kebijakan multirasialisme ini seperti dikemukakan oleh Dr. Isa Hassan:

“...berawal dari ketegangan antar ras yang terjadi di awal sejarah negara Singapura pada tahun 1950-an dan 1960-an. Persaingan dan kerusuhan ras sebelumnya, membuat para pemimpin Singapura pada waktu itu prihatin terhadap stabilitas politik sebagai bangsa. Karena itu, pemerintah mengadopsi kebijakan yang memberikan pijakan dan status yang sama untuk setiap warga Singapura. Niat awal pemerintah yang paling urgent terkait multirasialisme adalah guna menghilangkan disparitas antar etnis dan kekerasan, sebaliknya menginginkan adanya kohesi sosial dalam masyarakat meskipun berbeda ras. Pemerintah ingin agar orang-orang dengan ras yang berbeda berinteraksi secara sosial dan terkait satu sama lain. Multirasialisme dimaksudkan sebagai kontrol sosial untuk menangkai ketidaknyamanan antar ras dan pemerintah, dengan menerapkan perlakuan yang adil dan sama pada semua pihak. Oleh karena itu tidak akan ada alasan untuk terjadi perselisihan atau ketegangan antara ras. Kebijakan multirasialisme diperkenalkan pemerintah untuk meringankan setiap ketegangan ras dan kesenjangan yang terjadi.”⁶¹

Dari uraian di atas terlihat sikap negara Singapura yang begitu berhati-hati dan waspada dalam menjaga keharmonisan antar etnis dan agama. Hal ini antara lain karena pasca kolonial, penduduk Singapura hanyalah imigran yang berasal dari beragam ras, yang dibawa oleh Inggris tanpa rasa keterikatan wilayah dan tanah air. Imigran dengan asal yang berbeda-beda tidak terasosiasi secara erat satu sama lain. Ide multirasialisme menegaskan identitas setiap orang di Singapura, dan

⁵⁹ . Wawancara dengan Dr. Syaifuddin, dosen pada program Diploma Muhammadiyah Association Singapura, pada tanggal 11 November 2015 bertempat di kampusnya, Lorong 14 Geylang Singapore.

⁶⁰ . Benyamin, 1976, hlm. 67

⁶¹ . Wawancara dengan Dr. Isa Hassan, Vice President III Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore.

mempromosikan ide bahwa meskipun di Singapura ada ras dan budaya yang beragam, semua dapat hidup berdampingan secara harmonis.⁶² Selain itu, kebijakan multirasialisme juga karena keberadaan dan kondisi Singapura sebagai sebuah negara kecil yang diapit oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim di Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Pengalaman relatif singkat Singapura terkait konflik agama yang bersifat rasial pada tahun 1950-an dan kerusuhan etnis tahun 1964 yang menyebabkan empat orang tewas dan delapan puluh orang luka-luka, menempati status ikonik dalam sejarah Singapura.

'Konflik agama' di tahun 1950-an dan 1960-an tersebut telah disorot oleh pemerintah PAP bahkan untuk membenarkan kebijakan administratif dan hukum yang kejam atas nama kepentingan nasional, ketertiban dan stabilitas sosial. Misalnya, kerusuhan Maria Hertogh pada 11-13 Desember 1950 telah menjadi sebuah ikon dari karakterisasi negara Singapura karena rentan terhadap destabilisasi di sepanjang garis agama dan etnis. Menurut narasi resmi, kerusuhan Hertogh, yang menyebabkan 18 orang tewas dan 173 luka-luka, dipicu oleh sengketa hak asuh atas seorang gadis keturunan Belanda bernama Maria Hertogh yang dibesarkan oleh keluarga Muslim Melayu selama pendudukan Jepang dan menikah sesuai hukum Syariah Islam. Namun, agama hanya satu dari berbagai faktor yang berkontribusi pada kerusuhan tersebut. Studi yang dilakukan oleh Aljunied menunjukkan bahwa kerusuhan itu sangat didorong oleh keluhan berbagai komunitas Muslim yang dipandang rendah oleh pemerintah kolonial, pengaruh ide-ide radikal, efek marginalisasi sosio ekonomi, sensasionalisasi pers dan ketidakefektifan badan pembuat kebijakan dan badan-badan keamanan kolonial lainnya. Namun, oleh pemerintah peristiwa ini dijadikan sebagai dasar argumen mengawal secara ketat pelaksanaan kebijakan multikulturalismenya dan menjaga harmonisasi antar agama dan etnis.

Pada tahun 1964, sebuah pertempuran selama prosesi memperingati maulid Nabi Muhammad memicu kerusuhan yang menewaskan 33 orang dan 600 luka-luka. Seperti kerusuhan Hertogh, kerusuhan 1964 tidak berbasis agama tapi sangat didorong oleh pertengkaran politik antara PAP dan kepemimpinan aliansi dalam kontes mendapatkan dukungan elektoral Melayu. Ketegangan politik ini diperparah lagi oleh provokator agen Indonesia yang berbasis di Singapura dan peradangan jurnalisme.

Kedua peristiwa kerusuhan ini menjadi peristiwa ikonik dalam sejarah Singapura dan dijadikan dasar argumentasi bagi sikap kewaspadaan dan kehati-hatian pemerintah dalam menangani keragaman etnis dan agama.

Hal ini nampaknya sangat penting bagi negara-negara dengan populasi multi-agama dan multi-etnis. Karena potensi volatilitas yang melekat dalam agama, negara secara konsisten berusaha untuk mengatur agama untuk menjaga ketertiban sosial.

⁶². Multiculturalism of Singapore, hlm.2.

Negara Singapura tidak berbeda; sebagai negara yang terdiri dari warga negara yang multi-etnis dan multi-agama, pemerintah PAP sungguh-sungguh mengadopsi sekularisme sebagai strategi untuk menjamin stabilitas sosial yang menjadi modal dan dasar bagi kelangsungan hegemoninya.

Multirasialisme tidak hanya berfungsi untuk mengenali perbedaan-perbedaan rakyat yang berbeda ras tetapi bahkan memeliharanya. Negara berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat identitas budaya yang unik untuk setiap ras, serta memberi mereka rasa identitas (*sense of identity*). Orang-orang dengan ras dan etnis berbeda di Singapura semua diklasifikasikan dengan istilah yang disebut dengan skema "CMIO" (Cina, Melayu, India, Lainnya). Dengan skema ini, setiap warga negara di Singapore dikategorikan sebagai salah satu dari empat ras tersebut. Setiap individu di Singapura mengidentifikasi dirinya sebagai Cina, Melayu, India atau Lainnya. Salah satu contoh bukti hal ini adalah penyebutan ras setiap warga Singapura pada kartu identitas /Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, negara menegaskan bahwa setiap ras tertentu memiliki bahasa ras mereka sendiri. Cina berbahasa Mandarin; Melayu = bahasa Melayu, India = Tamil) dan agama ras (Cina = Buddha, Melayu = Islam, India = Hindu). Untuk pernikahan antar ras, mereka ditentukan berdasarkan ras ayahnya oleh hukum.⁶³ Tentu saja, pembatasan warga negara menjadi hanya menjadi empat ras menjadi penyederhanaan. Keluarga dengan pernikahan antar ras dapat mengalami problem terkait kategorisasi ini. Salah satu dari problem tersebut tercermin dalam diskusi tentang sistem pendidikan yang diikutinya. Sehubungan dengan skema ini, Singapura telah mengadopsi kebijakan bilingual untuk sistem pendidikan. Setiap siswa di sekolah perlu belajar bahasa Inggris dan "ditugaskan" untuk belajar bahasa ibu mereka, yang adalah bahasa ras siswa bersangkutan. Dalam kenyataannya, terdapat beberapa kasus dimana bahasa ibu menjadi sesuatu yang bisa dipilih, bukannya ditentukan berdasarkan identitas. Pilihan bahasa terkadang menjadi satu strategi atau terkait kepentingan ekonomi. Untuk beberapa ras, diyakini bahwa belajar Mandarin secara ekonomis lebih menguntungkan bagi anak mereka karena Singapura didominasi Cina.⁶⁴

Kekuatan pendorong utama di balik multikulturalisme adalah meritokrasi dan kesetaraan, yang berusaha memperkuat setiap konstituen ras "CMIO" yang memiliki identitas yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan di atas, kebijakan multikulturalisme ini terkait erat dengan realitas masyarakat Singapura yang majemuk (*plural*), karena :

“Multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk

⁶³. Chua, Chua Beng Huat, *Political Legitimacy and Housing, Stake holding in Singapore*, hlm. 61.

⁶⁴. Ibid. hlm. 61.

kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat”.

Multikulturalisme lahir dilatarbelakangi oleh “kebutuhan akan pengakuan (the need of recognition) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Singapura. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme diharapkan pemerintah menjadi suatu ideologi, yang menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya”:

“yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan (equality) dan prinsip pengakuan (recognition) pada berbagai definisi multikulturalisme. Misalnya, multikulturalisme dimaknai sebagai pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik”.⁶⁵

Menurut Parekh:

“Ada tiga komponen multikulturalisme, yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi dasarnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga Negara”.⁶⁶

Setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan:

⁶⁵. Azra, Azyumardi. 2007. —Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia. <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>

⁶⁶. Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*. Harvard., 2001

“Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang –bukan kolektif— berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (founders). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing. Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan oleh konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri.”⁶⁷

Singapura dalam konteks ini nampaknya lebih mirip dengan model pertama, yaitu model yang mengedepankan nasionalitas.

Menerapkan multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan politik bukan tanpa kritik dan implikasi masalah. Karena

“Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang dan anti terhadap, atau setidaknya bermasalah dengan, monokulturalisme dan asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah negara bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas, sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana dan belum terwujud (pre-existing). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda

⁶⁷. Ana Irhandayaningsih, *Kajian Filosofis terhadap Multikulturalisme Indonesia*”, hlm.4-5.

dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan, yang satu melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan”.

Selain itu juga muncul kritik terhadap “multikulturalisme”. Secara awam, disadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa, termasuk Singapura. Namun demikian, secara filosofis, multikulturalisme memiliki masalah yang relatif fundamental terkait konsep equalitas budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme. Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak. Pertama, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan (one and many). David Miller menulis:

“Multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-perbedaan antar kelompok budaya dengan mengorbankan berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong para warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan.⁶⁸ Hal ini, --menurut Anne Phillips akan menghancurkan kohesi sosial, melemahkan identitas nasional, mengosongkan sebagian besar dari isi konsep —kewarganegaraan. Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme dalam psike kelompok-kelompok kultural.⁶⁹ Intinya, ada risiko konseptual dalam multikulturalisme bahwa perbedaan budaya akan terlalu disakralkan sehingga kebenaran universal tentang praktik sosial-politik yang ideal tidak lagi dicari dan kritik normatif atas praktik budaya tertentu ditabukan. Sampai di titik ini, kita bisa memandang proyek multikulturalisme dengan lebih menyeluruh, bukan semata-mata sebagai jargon politik untuk mencitrakan ideologi atau organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis dengan asumsi-asumsi yang ternyata problematis. Salah satu ironi dari proyek multikultural, lanjut Anne Phillips adalah bahwa atas nama kesetaraan dan respek mutual antar elemen masyarakat, ia juga mendorong agar memandang kelompok-kelompok dan tatanan-tatanan budaya secara sistematis lebih berbeda dari pada kenyataan sesungguhnya dan dalam proses tersebut, multikulturalisme berkontribusi menciptakan stereotipisasi wujud-wujud kultural yang ada”.⁷⁰

⁶⁸ David Miller, *On Nationality*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

⁶⁹ Anne Phillips, *Multiculturalism without Culture*, (Princeton: Princeton University Press, 2007), hlm. 13.

⁷⁰ Anne Phillips, *Multiculturalism without Culture*, hlm. 25.

Dengan demikian, untuk konteks Singapura, nampaknya kebijakan multirasial di beberapa bagian, telah mencapai tujuan utamanya, terutama dalam meningkatkan kohesi sosial. Sementara di sisi lain, juga membawa beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kritik dan konsekuensi yang bersifat umum seperti yang disampaikan di atas.

E.5. Mengelola Agama Melalui Kooptasi

Secara umum, negara sekuler berarti bahwa negara menjadi netral dalam permasalahan agama; tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama.⁷¹ Agama menjadi urusan pribadi dan pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Namun demikian, sekularisme versi Singapura relatif berbeda, terutama dalam penerapannya terhadap komunitas Muslim.

Pemerintah secara implisit menunjukkan sikap dan tindakan sebaliknya. Di satu sisi, sebagai negara sekuler, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan Muslim seperti larangan jilbab bagi siswi, tidak ada pelajaran agama di sekolah, larangan azan menggunakan sound sistem, kebijakan terkait penempatan di apartemen yang tidak sensitif terhadap kebutuhan Muslim, dll., namun di sisi lain pemerintah memandang pengelolaan agama sebagai hal penting. Pemerintah juga mengakui bahwa agama memberikan kontribusi positif baik bagi kehidupan manusia secara pribadi maupun sebagai warga negara. Dr. Yacob Ibrahim, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Sukan di eranya menegaskan tentang kontribusi agama bagi pembangunan bangsa:

“Great religions have provided the spiritual and moral anchor for their followers. Some of these beliefs and values have been integral parts of human civilization for thousand years. The Communist tried to build a society without a place for religion but they failed. Millions of people today derive joy and hope from religion. For them, aspiring to the spiritual is part of human being. Indeed, religions often embody the nobler aspects of human beings. In Singapore, religious people and groups have been positive and constructive contributors to nation building.”⁷²

Menyatakan Singapura sebagai negara sekuler, tidak berarti bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya manajemen pelaksanaan agama kepada pemeluknya. Justeru karena sangat bertekad menjadi negara sekuler, sementara

⁷¹. John T. S. Madeley and Zsolt Enyedi, *Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality*, (Routledge, 2003).

⁷². Teks pidato Dr. Yacob Ibrahim, Menteri Pembangunan Masyarakat & Sukan Singapura pada Hari Badan Antara Agama (IRO), 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/2002031703.htm>

masyarakatnya sangat beragam dalam agama dan etnis, pemerintah merasa penting untuk mengatur dan melakukan kontrol yang ketat terhadap penyelenggaraan agama melalui kooptasi badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti ditegaskan oleh Nasir:

“Here is a society that is very determined to be a secular state, but one that is deeply diverse in religion and ethnicity, and in order to achieve that secular goal it must manage its religious hinterland”.⁷³

Manajemen agama memang menjadi perhatian penting bagi negara manapun yang mengaku menjadi sekuler. Hal ini sangat penting di negara-negara dengan populasi multi-agama dan multi-etnis. Karena potensi kecenderungan berubah (fluktuasi dan instabilitas) yang melekat dalam agama, negara secara konsisten berusaha untuk mengatur agama untuk menjaga ketertiban dan menjamin stabilitas sosial. Negara Singapura –dalam hal ini– tidak berbeda, apalagi dilatarbelakangi oleh pengalaman pahit sejarahnya yang pernah berhadapan dengan konflik antar etnis. Selain itu, juga mengingat tumbuhnya ekstremisme Muslim di beberapa negara. Hal ini menjadi ancaman bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan menjamin stabilitas sosial, mengingat tatanan sosial adalah landasan legitimasi dan hegemoni pemerintahan PAP (People’s Action Party). .

Ada beberapa strategi yang digunakan pemerintah Singapura dalam mengelola agama. Satu diantaranya adalah dengan mengkooptasi (memilih) badan dan organisasi keagamaan baik secara formal maupun informal dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa. Peka terhadap kekuatan agama untuk memobilisasi dan memotivasi, pemerintah PAP secara selektif mengkooptasi dan memanfaatkan potensi agama untuk membantu memainkan peran pemerintah dalam mengelola agama, sehingga tidak terlihat pemerintah mengelola agama secara langsung. Dalam proses kooptasi, ada badan atau organisasi yang dikooptasi. Dengan kata lain, badan atau organisasi yang dipilih membiarkan diri mereka dikooptasi/dipilih.

Ada banyak definisi tentang kooptasi dalam literatur, dan mengejutkan, sebagian besar disertai dengan penilaian normatif yang sebagian besar negatif. Untuk menjadi 'terkooptasi', seperti yang umum dipahami, berarti 'jual jiwamu' kepada pihak berwenang. Pemahaman umum kooptasi ini mungkin berasal dari istilah yang digunakan dalam kritik Marxis terhadap negara. Marxis atau penulis yang berhaluan kiri seperti Gramsci dan Therborn telah menggunakan istilah ini, biasanya untuk menunjukkan strategi negara untuk mensubordinasi massa. Namun demikian, untuk keperluan penelitian ini, 'kooptasi' akan didefinisikan sebagai proses tujuan (atau hasil) dari negara yang bekerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi

⁷³. Kamaludeen Mohammed Nasir, *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 2

keagamaan secara harmonis, tanpa ada penilaian sinis tentang apakah itu 'baik' atau 'buruk' dalam arti moral. Dengan demikian, kooptasi tidak berarti hubungan tunduk atau seluruh prosesnya negatif; melainkan hanyalah strategi yang sering digunakan baik oleh negara maupun badan yang kurang kuat yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekali lagi, baik negara maupun lembaga yang dikooptasi sama-sama berupaya mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Karena itu, hubungan antara organisasi keagamaan tersebut dan negara bersifat simbiosis mutualisme.

Terkait dengan kooptasi dan hubungannya dengan sekularisme, hasil studi yang dilakukan oleh Walid Jumblatt Abdullah menyebutkan ada dua strategi yang digunakan negara dalam kerangka sekularismenya. Pertama, apa yang dibahasakan oleh Abdullah dengan 'Sekularisme Otot' (mascular secularism) dimana hukum dan kooptasi secara resmi digunakan. Sekularisme otot mengacu pada intervensi langsung oleh negara. Pendekatan ini ditandai dengan penerapan undang-undang yang ketat, regulasi yang mengawal secara ketat pelaksanaan agama serta kooptasi formal seperti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap MUIS. Kedua, 'Sekularisme Dikalibrasi' (calibrated secularism) yaitu lebih merupakan bentuk intervensi tidak langsung yang terdiri dari hubungan simbiosis antara organisasi keagamaan yang bersangkutan dan negara. Contohnya adalah kooptasi informal seperti yang diperlakukan oleh negara kepada Pergas. Boleh jadi ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan membiarkan diri mereka terkooptasi, sehingga secara kritis menekankan peran lembaga dan sifat non-pasif aktor yang terlibat. Dua pendekatan ini telah bekerja bersama-sama menjamin stabilitas sosial, dan karenanya mempertahankan hegemoni PAP, karena tatanan sosial adalah landasan legitimasi PAP.⁷⁴

Organisasi yang setuju untuk dikooptasi sering melakukannya dengan tujuan akhir yang lebih besar, dan mereka menggunakan posisi mereka vis-à-vis negara juga untuk keuntungan mereka sendiri. Tambahan lagi, kooptasi juga harus dilihat tidak hanya sebagai mekanisme formal, dimana negara menggunakan sarana kelembagaan untuk mengkooptasi organisasi dengan membuat mereka bagian dari lengan eksekutif pemerintah, tapi kooptasi juga ada dalam bentuk yang jauh lebih halus dan canggih, di mana hubungan simbiosis ada pada tingkat informal.

Di antara badan dan organisasi yang dipilih/dikooptasi oleh pemerintah untuk memainkan perannya dalam mengelola agama adalah Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Persatuan Guru Agama Islam (PERGAS).

⁷⁴ . Walid Jumblatt Abdullah, *Religious Representation in Secular Singapore: A Study of MUIS and Pergas*, hlm. 4-5.

E.5a. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah birokrasi agama yang disponsori negara dengan status badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola urusan agama Islam. Semua pengurus kunci dalam MUIS, termasuk Mufti (pemimpin agama Muslim) ditunjuk oleh presiden berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri.⁷⁵

Dengan demikian, pelaksanaan syiar dan dinamika Islam di Singapura terkait erat dengan peran dan fungsi penting MUIS sebagai badan yang diberi amanah oleh pemerintah untuk mengelola urusan terkait agama Islam.

“Institusi yang setingkat Kementerian Agama di Indonesia ini didirikan sejak tanggal 1 Juli 1968 dan memiliki wewenang dan tanggung jawab atas seluruh aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan urusan peribadahan, hukum, perekonomian, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan Islam. Lebih jelasnya, MUIS mempunyai tugas dan fungsi utama: Pertama, memberi saran kepada presiden dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Kedua, mengurus masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum Muslimin, termasuk urusan haji dan sertifikasi halal bagi makanan yang dikonsumsi. Ketiga, mengelola wakaf dan dana kaum Muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. Keempat, mengelola pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mendukung dan mensyiarkan agama Islam, atau untuk kepentingan umat Islam. Kelima, mengelola semua mesjid dan madrasah di Singapura”.⁷⁶

Dalam prakteknya –seperti yang disampaikan oleh salah seorang responden yang juga pengurus MUIS– badan resmi pemerintah ini juga mengawasi mesjid-mesjid; mempunyai otoritas untuk menyetujui calon komite manajemen mesjid; mengelola dana pembangunan Mesjid (Mosque Bulding Fund dising kat MBF) yang mengumpulkan sumbangan uang dari pekerja Singapura untuk pembangunan dan pemeliharaan mesjid. MUIS juga mempunyai otoritas terhadap kurikulum pendidikan Islam, pengelolaan kurban, pernikahan, dsb. Sejak tahun 1975, semua jamaah haji harus mendaftar kepada MUIS dan hanya bisa melakukan haji melalui persetujuan MUIS. Selain itu, MUIS juga menyediakan teks khutbah Jumat serta mengawasi pelaksanaan khutbah Jumat pada setiap mesjid dalam rangka meyakinkan isinya sejalan dengan konsep multikulturalisme yang dianut Singapura. Para guru agama, berkewajiban memiliki sertifikat atau izin ceramah dari MUIS. Untuk memperoleh

⁷⁵. Suzaina Kadir, ‘Islam, State and Society in Singapore’, *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol.5, No.3, 2004, hlm. 360.

⁷⁶ . Website Majelis Ugama Islam Singapura, <http://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2013.

sertifikat/izin mereka terlebih dahulu wajib mengikuti program sertifikasi berupa pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga, pemahaman dan kompetensi keagamaannya juga secara periodik diup-grade dan diup-date. Ustazah Rani, responden penelitian ini menyatakan

“... intinya adalah brain washing untuk memastikan bahwa arah dan orientasi pengajaran dan ceramah agama yang akan disampaikan adalah ajaran Islam sesuai harapan pemerintah Singapura, tidak mengarah pada fundamentalisme dan radikalisme serta tidak keluar dari koridor yang ditentukan pemerintah, yaitu ajaran Islam yang modert dan progresif dan tetap “memelihara harmoni antar umat beragama”.⁷⁷

MUIS yang menempati gedung megah di 273 Braddel Road, tepatnya di komplek Islamic Centre Singapura ini juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan fatwa terkait persoalan-persoalan kehidupan Muslim Singapura. Di samping itu, MUIS juga berwenang dalam menentukan dan mensertifikasi produk halal.⁷⁸

Seperti dibahas sebelumnya, ada banyak alasan mengapa negara mengkooptasi sebuah organisasi dan banyak alasan pula bagi organisasi untuk menyetujui pengkooptasian tersebut. MUIS baik secara formal (kelembagaan) dan informal (ideologis) dikooptasi oleh negara. Selain itu, ini adalah keputusan sadar yang dibuat oleh MUIS. Institusi ini sepenuhnya menyadari biaya dan manfaat dari perjanjian ini. Proses kooptasi terhadap MUIS adalah sebuah pendekatan yang diambil negara untuk mengelola agama demi stabilitas sosial Singapura. Ini merupakan versi Singapura yang berbeda sebagai negara yang menganut sekularisme. Di sini, strategi Sekularisme Otot (muscular secularism) dan Sekularisme Dikalibrasi (calibrated secularism) digunakan secara bersamaan terhadap MUIS. Strategi Sekularisme Otot digunakan dalam konteks di mana ada hukum-hukum yang ketat yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan MUIS, dan itu adalah kooptasi resmi. Sedangkan dikalibrasi sekularisme adalah dalam konteks di mana MUIS secara ideologi juga dikooptasi.

Hal ini tidak berbeda dengan pengalaman negara Malaysia, di mana seringkali digembar-gemborkan sebagai contoh Islam "moderat" dan stabilitas sosial. Menurut Hamayotsu, Malaysia telah berhasil membirokratisasi dan melembagakan organisasi keagamaan melalui berbagai metode, terutama kooptasi, sehingga ekstremisme agama dapat ditahan. Dia berpendapat bahwa motivasi negara untuk mengkooptasi

⁷⁷. Wawancara dengan Ustadzh Hairani, guru pada Madrasah Andalus, pada tanggal 9 November 2015.

⁷⁸. Kendati berada di negara yang cenderung sekuler, halal atau tidaknya suatu produk menjadi concern serius komunitas Muslim Singapura. Tidak mengherankan jika Singapura sudah secara resmi sejak tahun 1978 melakukan sertifikasi terhadap produk halal, lebih awal dibanding Indonesia yang memiliki populasi mayoritas Muslim.

organisasi keagamaan didorong oleh tiga faktor utama: Pertama, untuk menahan ekstremisme agama. Kedua, untuk mendapatkan legitimasi dari Melayu/Muslim dan memenangkan kompetisi pada pemilihan umum melawan partai-partai oposisi (terutama Parti Islam Se-Malaysia/PAS) dan akhirnya, keinginan oleh aktor negara untuk memperoleh dukungan dalam partai mereka sendiri (sebagai seseorang yang dianggap sebagai pro-Islam mungkin mendapatkan dukungan tambahan bahkan dari dalam partai). Sementara alasan ketiga mungkin tidak relevan dengan konteks Singapura, saya setuju dengan dua faktor pertama, meskipun dengan tingkat yang berbeda. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk mencegah ekstrimisme dan radikalisme adalah dengan mengkooptasi organisasi agama dan ulama. Organisasi keagamaan, pada gilirannya, menyadari manfaat dari bekerja sama dengan negara sedemikian rupa. Namun, dengan membiarkan diri mereka terkooptasi, kredibilitas mereka menjadi dipertanyakan oleh konstituen mereka sendiri seperti yang dialami oleh Pergas (Persatuan Guru Agama Islam)

Persepsi masyarakat Muslim tentang MUIS sebagai badan yang dipengaruhi oleh negara ditegaskan oleh presiden Persatuan Guru Agama Islam Singapura (PERGAS), Uztaz Hasbi, pada tahun 2003. Dia mengumumkan bahwa PERGAS harus berfungsi sebagai jangkar moral bagi umat Islam di Singapura karena:

'MUIS tidak bisa melakukannya ... MUIS adalah badan hukum, mereka harus melayani kepentingan negara. Karena itu adalah tanggung jawab kita untuk melayani kepentingan masyarakat Muslim'.⁷⁹

Demikian pula, banyak organisasi komunitas Muslim dipengaruhi pemerintah dengan ketergantungan mereka pada dana negara dan posisi dominan politisi PAP dalam organisasi tersebut. Misalnya, Ketua organisasi swadaya Muslim Mendaki adalah Menteri PAP, Yaacob Ibrahim. Beberapa anggota parlemen PAP juga di Direksi Dewan Mendaki. Selain itu, negara berhasil mengelola dana (Central Provident Fund) yang memfasilitasi pengumpulan sumbangan pembangunan Mesjid, sementara Konstitusi Singapura menyediakan hukum agama dan pribadi khusus dan pengadilan syariah bagi umat Islam.

Jadi meskipun mekanisme legislatif dan kebijakan yang seolah-olah memperkuat pemisahan agama dan politik, negara terus mencampuri ranah agama. Dengan demikian akan muncul bahwa pemisahan agama dan politik hanya berlaku untuk warga negara dan bukan pemerintah PAP.

Selain itu, perlu dicatat bahwa pemerintah PAP mendukung organisasi kesejahteraan berdasarkan agama yang memainkan peran penting dalam membantu mereka yang kurang beruntung secara sosial. Organisasi keagamaan Islam yang turut berperan aktif dalam membantu kegiatan kesejahteraan sosial (social welfare) ini

⁷⁹. Suzaina Kadir, 'Muslim Politics, the State and Society', dalam Kenneth Paul Tan (ed.), *Renaissance Singapore? Economy, Culture and Politics*, (Singapore: NUS Press, 2007), hlm. 150.

antara lain adalah Jamiyah dan Muhammadiyah. Kedua lembaga ini juga di pilih (dikooptasi) oleh pemerintah dalam menangani pelayanan lanjut usia baik secara phisik maupun psikis; membantu kesejahteraan kaum dhu'afa; dan menyediakan pendidikan dan rehabilitasi bagi anak-anak dan remaja yang bermasalah, pelaku kriminal, atau yang orangtuanya bermasalah sehingga tidak dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya.⁸⁰ Untuk pendanaan operasional kegiatan tersebut, sebagian besar diperoleh oleh baik Jamiyah maupun Muhammadiyah dari pemerintah.

Jamiyah nampak memainkan peran penting dalam masyarakat Singapura kontemporer melalui program bantuan terhadap orang miskin dan korban narkoba serta membantu masyarakat Melayu terbelakang untuk mendapatkan pendidikan modern. Selain itu, juga menyediakan layanan kesehatan dan konsultasi hukum dan konseling secara free bagi yang membutuhkan. Dakwah dilakukan bi al-hal wa al-mal. Mempraktekkan dakwah berarti memberikan keteladanan dan menjadi aktif dalam urusan kesejahteraan.

Apa yang dilakukan oleh dua organisasi keagamaan ini sejalan dengan pendekatan pemerintah 'banyak tangan membantu kesejahteraan' yang berfungsi untuk meminimalkan pengeluaran biaya kesejahteraan. Selain itu, institusi Mesjid juga telah lama menyediakan layanan sosial dalam bentuk kelas kuliah remedial, haji dan kelas bahasa Arab, beasiswa, voucher makanan untuk keluarga berpenghasilan rendah, layanan konseling dan program rehabilitasi untuk mereformasi anak nakal dan pelaku kriminal.

E.5b. Persatuan Ulama dan Guru Agama Islam (PERGAS)

Pergas didirikan pada tahun 1956, dengan tujuan utama menyediakan dan menghasilkan pemimpin Islam yang kredibel dan mempromosikan pengembangan sumber daya 'asatizah'. Pergas berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya pemimpin agama dalam membimbing masyarakat. Area fokusnya meliputi kesejahteraan dan pengembangan Asatizah, pendidikan Islam, pengajian dan dakwah dan pengembangan penelitian.

Menariknya, Pergas bertujuan untuk membina asatizah yang dalam konteks ini tidak hanya berarti para da'i, tetapi juga para "intelektual, ulama dan pemimpin masyarakat. Penggunaan istilah 'ulama' memiliki pengaruh yang signifikan pada bagaimana Pergas merumuskan identitas diri. Istilah itu sendiri berarti 'seorang terpelajar' atau 'ulama' tetapi selama bertahun-tahun, telah memperoleh signifikansi lebih dalam dunia Muslim. 'Ulama' lebih dari sekedar guru agama; mereka dianggap sebagai "wali" dan "penjamin" masyarakat Islam, menjadi pemandu spiritual dan intelektual. Kadang-kadang, mereka bahkan mungkin diharapkan oleh masyarakat

⁸⁰. Wawancara dengan Dr. Zuremi, Direktur Program Diploma Muhammadiyah Association pada tanggal 11 November 2015, dan Dr. Isa Hassan, Vice Rektor III, Jamiyah pada tanggal 13 November 2015.

Muslim melakukan peran politik atau sosial, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak umat Islam, termasuk hak untuk mempraktikkan agama mereka, dilindungi. Ulama menganggap dirinya sebagai penjaga agama, begitu juga anggapan dari komunitas Muslim

"Ulama haruslah orang yang tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga orang-orang yang membela Islam dan memperjuangkan komunitas Muslim. Sementara ulama tidak harus terlibat langsung dalam politik, mereka harus menjadi semacam kelompok penekan dan mengartikulasikan hak-hak Muslim. Bahkan, kaum Muslim mengharapkan orang-orang yang semacam ini yang menyebut diri mereka ulama."⁸¹

Pergas adalah entitas yang mendanai diri sendiri dan secara resmi independen. Ia terutama bergantung pada investasinya sendiri dan dari kontribusi komunitas Muslim. Sejauh ini, ia tidak memiliki link langsung dengan negara, karena tidak berada di bawah yurisdiksi kementerian atau pejabat manapun. Majelis Tertinggi Pergas (Komite Eksekutif) terdiri dari empat belas orang, dimana lima memegang posisi tertentu, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Bendahara, Sekretaris dan Asisten Sekretaris. Seluruh empat belas anggota dipilih menjadi panitia oleh anggota Pergas pada Rapat Umum Biennial (BGM), yang terakhir berlangsung pada Desember 2011. Presidennya dipilih pada BGM; ia kemudian memiliki hak prerogatif untuk memilih empat lainnya. Jadi tidak ada pertanyaan tentang co-opsi formal maupun kelembagaan, mengingat Pergas tidak bergantung pada dana dari negara, juga tidak ada arahan negara terkait penunjukan pemegang kunci organisasi. Fungsi penting organisasi Pergas adalah administrasi Asatizah Recognition Scheme (ARS). Skema ini sudah diatur oleh MUIS, dengan tujuan menghilangkan ajaran agama yang menyimpang. Melalui ARS, hanya mereka yang bersertifikat yang diperbolehkan untuk mengajar ilmu agama Islam di Singapura. Meskipun inisiatif dari MUIS, Pergas dipercayakan mengelola skema ini. Tidak hanya ini yang mencerminkan hubungan simbiosis antara MUIS dan Pergas, hal ini menunjukkan pengaruh besar Pergas dalam komunitas Muslim: Pergas memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang dapat atau tidak dapat mengajarkan Islam di Singapura, diakui berdasarkan pedoman tertentu. Selain itu, sudah biasa bahwa komite eksekutif Pergas menjadi anggota Dewan Fatwa MUIS, dan pada saat ini, dua dari lima anggota tetap dewan berasal dari Pergas.

Secara historis, peran Pergas telah mengalami serangkaian perubahan. Dalam periode menjelang awal 1990-an, terutama di bawah kepemimpinan Ustaz Ali, Pergas tidak memiliki keterlibatan dalam pemerintah atau masyarakat terkait masalah moral atau hubungan negara dan Muslim, melainkan lebih fokus pada pengajaran iman

⁸¹ . Walid Jumblatt Abdullah, *Religious Representation in Secular Singapore: A Study of MUIS and Pergas*, hlm. 72-74.

Islam bagi Muslim. Namun, di bawah kepemimpinan Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Pergas mengambil peran tampak lebih aktif dalam masalah sosial. Generasi baru guru agama Islam percaya bahwa keterlibatan aktif dengan negara dan masyarakat pada umumnya sangat penting bagi Muslims.

Menurut Abdullah, Pergas telah mengalami pergeseran halus dan luar biasa dari periode 1995-2003/4 ke 2003/4-sekarang. Selama periode awal yang berada di bawah Ustaz Presiden Abdillah dan bahkan tahun-tahun awal Ustaz Hasbi, Pergas adalah entitas yang sangat independen, siap untuk menghadapi negara ketika ada konflik kepentingan atau nilai-nilai mendasar antara negara dan masyarakat misalnya menentang pemerintah terkait larangan penggunaan tudung kepala bagi siswi di sekolah, dan mewakili Muslim Singapura menyuarakan penentangan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan nasional dari pada kebutuhan keagamaan pada kurikulum pendidikan wajib (Compulsory Education); serta menentang sikap pemerintah yang mendukung AS melakukan invansi ke Iraq. Di tahun-tahun terakhir, karena berbagai alasan, Pergas telah bersekutu, meskipun secara informal, dengan negara. Kooptasi informal telah terjadi. Dalam beberapa kasus dimana masyarakat sangat mengharapkan kehadiran Pergas untuk menyuarakan keinginan dan harapan masyarakat seperti pada kasus Integrated Resorts Issue (IRs), pernyataan Lee Kuan Yew yang mendiskreditkan Muslim, dalam kenyataannya Pergas tidak lagi dapat diharapkan. Pergas memilih diam.

Dengan demikian, Pergas adalah organisasi non-government yang dipilih/dikooptasi secara informal oleh pemerintah untuk memainkan perannya dalam mengelola agama. Memang, berbeda dengan MUIS yang dikooptasi secara langsung oleh pemerintah, Pergas berada pada posisi yang sama sekali berbeda. Tidak mudah untuk memastikan karakter yang tepat tentang hubungan antara Pergas dan negara, karena hampir tidak ada koneksi langsung antara keduanya, dan Pergas tampaknya menjadi sebuah badan independen. Pergas dapat digambarkan sebagai Organisasi Non-Government (LSM) yang memiliki penyebab spesifik untuk memenangkan semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, tidak seperti MUIS, yang merupakan badan hukum. Namun demikian beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pergas terkooptasi oleh negara secara informal (ideologis /psikologis), bukan secara institusional. Berbeda dengan MUIS yang terkooptasi baik secara formal (institusional) maupun informal (ideologis/psikologis).

Menurut Hall, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organisation (NGO) dapat didefinisikan sebagai

“tubuh individu yang mengasosiasikan diri untuk salah satu dari tiga tujuan: 1) untuk melakukan tugas publik yang telah didelegasikan kepada mereka oleh negara; 2) untuk melakukan tugas publik di mana ada tuntutan yang baik negara maupun organisasi nirlaba tidak bersedia untuk memenuhinya; atau 3)

untuk mempengaruhi arah kebijakan negara, sektor nirlaba, atau organisasi nirlaba lainnya”⁸²

Cormode secara khusus menyatakan bahwa organisasi keagamaan termasuk dalam kategori ini.⁸³

Najam menyebutkan empat kemungkinan jenis hubungan LSM dan negara: saling melengkapi, konfrontasi, kerjasama dan kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai upaya oleh salah satu pihak untuk "mengubah preferensi pihak lain agar memiliki tujuan dan makna tertentu.”⁸⁴ Abdullah berpendapat bahwa pada periode awal (1995-2012), Pergas mengadopsi sikap konfrontatif terhadap negara; namun setelah tahun 2004, mulai terjadi proses kooptasi informal. Secara kelembagaan, Pergas independen, namun secara ideologis/ psikologis, preferensi mereka tentang 'tujuan dan makna' telah berubah. Dalam hal ini, sekularisme dikalibrasi' adalah satu-satunya pendekatan yang digunakan oleh negara. Sekali lagi, kooptasi adalah proses dua arah (dual-way). Pergas rela mengizinkan dirinya untuk dikooptasi secara informal dan dengan demikian siap untuk mengubah tujuan-tujuannya, demi memperoleh manfaat.⁸⁵ Selain Pergas, Muhammadiyah dan Jamiyah adalah dua organisasi keagamaan lainnya yang dikooptasi secara ideologis dan psikologis.

F. Mengatur & Mengawasi Agama Melalui Undang-undang yang Ketat

Selain pengelolaan agama melalui kooptasi, pengaturan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan agama juga dapat ditunjukkan dengan penerapan undang-undang pemeliharaan harmoni agama (MHRA), regulasi tentang hasutan dan Internal Security Act. Antara lain, regulasi ini diarahkan untuk membatasi politisasi agama dengan mencoba memisahkan agama dari politik, mengatur kegiatan keagamaan dan menahan perkembangan masyarakat sipil Muslim yang otonom.

Konstitusi Singapura memberikan kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat dan beragama. Secara khusus, Pasal 12 menjamin persamaan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi ras dan agama, Pasal 14 memberikan kebebasan berekspresi dan Pasal 15 kebebasan beragama dan pengamalannya. Demikian pula,

⁸² Peter Dobkin Hall, “A Historical Overview of the Private Nonprofit Sector,” in *The Non-Profit sector: A Research Handbook*, ed. Walter W. Powell (New Haven: Yale University Press, 1987), hlm. 7.

⁸³ . D. Scott Cormode, “Review Essay: Religion and the Non-Profit Sector,” *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 23 (1994), hlm. 71.

⁸⁴ . Adil Najam, “The Four C’s of NGO-Government Relations: Complementarity, Confrontation, Cooperation, Co-optation,” (LEAD-Pakistan Occasional Paper No. 11, 2000), hlm. 9-13.

⁸⁵ . Walid Jumblatt Abdullah, *Religious Representation in Secular Singapore*., hlm. 72-73.

Pasal 16 (2) dan Pasal 16 (3) memberikan hak pada setiap kelompok agama untuk mendirikan, memelihara lembaga pendidikan dan menawarkan pembelajaran atau mengambil bagian dalam upacara atau tindakan atau ibadah dari agama selain agama mereka sendiri. Namun, sementara Pasal 15 memberikan hak untuk kebebasan dan praktik keagamaan, hak ini tunduk pada aturan dimana warga tidak boleh melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moralitas. Hak bersyarat ini memungkinkan pemerintah PAP untuk menentukan kegiatan keagamaan 'yang tepat'.

Sejumlah undang-undang dan kebijakan administratif telah membatasi hak konstitusional dan sipil dari warga Singapura dengan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum. Ada beberapa regulasi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan agama dan menjaga meritokrasi antar agama dan etnis. Selain itu juga terdapat regulasi yang diarahkan untuk membatasi politisasi agama dengan mencoba untuk memisahkan agama dari politik, mengatur kegiatan keagamaan dan menahan perkembangan masyarakat sipil Muslim otonom. Berikut uraian dari aturan dan regulasi dimaksud:

F.1. Undang-Undang Pemeliharaan Harmoni Agama (MHRA)

Negara kota ini memiliki ciri khas yang unik dengan menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah menyusun undang-undang penegakkan pemisahan agama dan politik –yang dimaksudkan untuk kepentingan menjaga 'kerukunan beragama' dan menjamin agama tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik atau tujuan subversif. Undang-undang ini dikenal dengan istilah “Maintenance of Religious Harmony Act” (MRHA) yang disahkan oleh parlemen pada November 1990 dan mulai diberlakukan sejak 31 Maret 1992.

Agaknya sifat dari komposisi etnis-religius, dan ketakutan pemerintah yang mendalam terkait perbedaan masyarakat berdasarkan garis etnis atau agama, telah menyebabkan pemerintah merumuskan doktrin kerukunan umat beragama yang ketat di Singapura, sebagaimana diakui oleh responden penelitian ini.⁸⁶

Alasan mengapa undang-undang ini diperlukan, disampaikan dalam White Paper yang dipresentasikan di parlemen dalam rangka mengusulkan undang-undang ini pada tahun 1989, yaitu bahwa Singapura belum kebal terhadap kenaikan semangat keagamaan di seluruh dunia. Kelompok agama di Singapura telah menjadi lebih tegas dan bersaing lebih intens untuk memperoleh pengikut dari sebelumnya. Ini telah meningkatkan kemungkinan gesekan antar-agama dan kesalahpahaman di masyarakat multi-rasial dan multi-agama seperti Singapura. Seiring dengan kebangkitan Islam di

⁸⁶ . Wawancara dengan Ust. Zuremi, Direktur Program Diploma pada Muhammadiyah Association di kantornya, pada tanggal 11 November 2015.

dunia, pada tahun 1980-an, religiusitas masyarakat di Singapura juga meningkat. Sejumlah insiden terjadi yang melibatkan Hindu, Muslim dan Kristen di Singapura. Selama periode ini ada sejumlah keluhan tentang metode penginjilan yang agak sensitif dari beberapa penganut Kristen. Hal ini turut menjadi daya dorong yang melatarbelakangi munculnya MHRA.⁸⁷

Selain itu White Paper juga mengidentifikasi dua kondisi penting yang diperlukan untuk kerukunan umat beragama di Singapura. Pertama, pengikut agama harus berlatih bersikap dan berperilaku moderat, bertoleransi serta menghindari melakukan hal-hal yang menyebabkan permusuhan atau kesalahpahaman antar kelompok agama. Kedua, agama dan politik harus dipisahkan, karena jika satu kelompok agama menjadi terlibat dalam politik, kelompok agama lain akan mengikutinya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, partai politik mungkin kemudian menganjurkan kebijakan yang mendukung satu kelompok atau lainnya untuk menggali dukungan dari para pengikutnya. Dampaknya akan menyebabkan persaingan dan ketegangan antar-agama, dan konsekuensi akhirnya adalah konflik dan ketidakstabilan politik.

Selain ketakutan pemerintah yang mendalam terkait perbedaan etnis dan agama, pengalaman pahit dalam sejarah Singapura⁸⁸ turut menyulut rasa ketakutan sebagian kelompok dalam pemerintahan PAP yang menilai sentimen agama dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik, dan berpotensi memberikan dampak serius pada stabilitas politik Singapura dan kelangsungan hidup ekonomi. Hal ini –dengan demikian– turut menjadi alasan pemerintah memandang perlu ada undang-undang Pemeliharaan Harmoni Agama (MHRA). Karena salah satu katalis utama dikeluarkannya regulasi MHRA oleh pemerintah terkait penangkapan Vincent Cheng, seorang Katolik Roma dan rekan-rekannya yang disinyalir membentuk kelompok politik dengan tujuan menumbangkan sistem sosial dan politik yang ada di Singapura yang disebut dengan Konspirasi Marxis.

Perhatian utama di balik MRHA jelas diartikulasikan oleh Menteri Senior S. Jayakumar dalam sebuah wawancara dengan The Straits Times:

"Peningkatan religiusitas itu sendiri tidak masalah. Saya melihat salahnya adalah adanya kelompok agama yang aktif dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pengikut untuk meningkatkan jumlah mereka. Sementara masyarakat kita adalah multi-rasial dan multi-agama".⁸⁹

⁸⁷. Ronald Chia, How You Preserve Religious Harmony in Multi-Religious Singapore? The Methodist Church in Singapore.

⁸⁸. Ketegangan etnis yang berdampak pada distabilitas sosial mengancam Singapura pada tahun 1969, menewaskan 4 (empat) orang dan 80 orang luka-luka. Setelah Singapura berpisah dari Malaysia dan menjadi Negara Republik tahun 1965, pemerintah memiliki visi-misi untuk menjadi "Singaporean Singapore" dengan membangun identitas nasional di kalangan empat kelompok utama etnis; Cina, Melayu, India dan Eurasia.

⁸⁹. Strait Times, 25 Juli 2009.

Dengan demikian, regulasi MHRA dianggap penting oleh pemerintah dalam rangka pelestarian hubungan damai antara kelompok dan mencegah aliansi yang tidak diinginkan antara agama dan politik.⁹⁰ Karenanya MRHA mengusulkan pemisahan ketat antara agama dan politik sebagai sarana untuk menjamin koeksistensi damai dari komunitas agama yang berbeda di Singapura.⁹¹ MHRA memperingatkan pemimpin atau anggota kelompok agama untuk tidak menggunakan agama dalam mempromosikan partai politik tertentu. Regulasi ini juga melarang politisi menggunakan gereja, mesjid atau kuil untuk memobilisasi dukungan untuk kampanye politik mereka. Selain itu, MHRA juga menasehati para pemimpin agama untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan hati-hati. Uskup Agung, mufti/ulama, pendeta tidak boleh menggunakan otoritas keagamaan mereka untuk memobilisasi oposisi terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Paragraf ke-22 mengungkapkan esensi MRHA ketika menyatakan :

"Anggota kelompok agama dapat, tentu saja, berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis sebagai perorangan warga negara. Mereka mungkin mengkampanyekan atau melawan pemerintah atau partai politik. Tapi mereka tidak harus melakukannya sebagai pemimpin konstituen agama mereka." ⁹²

Undang-undang tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan rasa permusuhan, kebencian, niat buruk atau permusuhan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda, serta untuk mencegah politik komunal dengan kedok agama. Hal ini meluas sehingga memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah terhadap hal-hal yang dianggap kegiatan politik terkait kegiatan keagamaan, meredakan situasi yang mengancam yang mungkin meningkat menjadi konflik sentimen keagamaan. Dengan adanya regulasi ini pemerintah dapat mengambil tindakan dengan cepat.

Meskipun sifat komprehensif dari MRHA, pemerintah PAP belum jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'kerukunan beragama'. Selain itu, parameter kegiatan keagamaan yang diperbolehkan tetap ambigu. Ambiguitas ini telah memperkuat budaya ketakutan dalam masyarakat agama dan masyarakat yang lebih besar.

Mengingat semua kekhawatiran dan perdebatan yang mengarah pada pemberlakuan Undang-Undang tersebut, 17 tahun pertama pemberlakuannya, cara kerja MRHA sudah tergerus tidak terdeteksi oleh mata publik. Tidak ada perintah penahanan yang pernah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri di Parlemen pada tahun 2007.

⁹⁰. Paragraf ke 27 Maintenance of Religious Harmony Act (MRHA).

⁹¹. Paragraf ke-13 dan 14 Maintenance of Religious Harmony Act (MRHA).

⁹². Paragraf ke 22 Maintenance of Religious Harmony Act (MRHA).

Apakah Undang-Undang itu hanya kebijakan belaka? Jauh dari itu, Kadir menilai, meskipun fakta bahwa tidak ada perintah penahanan telah dikeluarkan sampai saat itu, UU itu lebih dari sekedar kebijakan dalam kerangka hukum yang luas yang mengontrol secara ketat peran agama dalam masyarakat. UU tersebut menurutnya mencerminkan instink paternalistik kepemimpinan politik yang kuat dalam merestrukturisasi perilaku pemilih dan mengarahkan politik menuju ke visinya. Hal itu menurutnya menggambarkan posisi ideologis pemerintah, menggaris-bawahi ketidakpercayaan yang mendalam kepemimpinan politik terhadap pemilih dan posisinya. Lebih penting lagi, UU tersebut menurutnya berfungsi membersihkan agama dari ruang politik sentral.⁹³ Undang-undang tersebut meskipun berpenampilan jinak, bukan tanpa kekuatan koersif untuk mengawal agar pemimpin agama sejalan, atau mencegah perdebatan politik. UU tersebut menghilangkan pengaruh agama dari kontestasi politik. Perhatian utama komunitas Muslim dalam hal ini adalah pada pemisahan agama dari politik, karena hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan.

F.2. UU Keamanan Dalam Negeri / Internal Security Act (ISA)

Internal Security Act (ISA) atau yang dikenal juga dengan Undang-undang Keamanan dalam Negeri dinilai sebagian kalangan sebagai bagian yang tidak lazim pada suatu undang-undang, yang mana penahanan dapat dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan. Hal ini melanggar UU kebebasan masyarakat, seperti yang terdapat Bagian IV Pasal 9 (1) dan 12 (1) UU tentang kebebasan pribadi, persamaan hak di mata hukum serta perlindungan hukum secara adil.

Undang-undang yang keras seperti Internal Security Act (ISA) telah sangat menimbulkan budaya ketakutan. Dulu, UU ini dirancang dan digunakan oleh pemerintah kolonial Inggris dalam kampanye Perang Dingin mereka melawan komunis dan nasionalis radikal lainnya. Pemerintah PAP tidak hanya mempertahankan undang-undang dan kebijakan ini tetapi memperluas ruang lingkup dan jangkauannya. ISA memungkinkan pembaharuan penahanan tanpa pengadilan selama dua tahun. ISA digunakan terhadap mereka yang dianggap bertindak dengan cara yang merugikan keamanan Singapura. UU tersebut adalah tipikal pemerintah yang 'berkuasa karena hukum' di negara-negara otoriter di mana eksekutif secara rutin ditimpa kekuatan negara lain seperti peradilan hukum dan legislasi. Hal ini memungkinkan hak eksekutif tidak harus memberikan bukti terhadap para tahanan ke pengadilan. Hak eksekutif ini didasarkan pada premis bahwa masyarakat percaya pada integritas pemerintah eksekutif dan negara dalam menjalankan amanah ini.

⁹³. Ibid.

Secara signifikan, undang-undang dan kebijakan administratif ini telah dikritik oleh badan-badan internasional seperti Komisi Ahli Hukum Internasional, Amnesty International, Asia Watch dan Human Rights Watch karena kegagalannya menyesuaikan dengan hukum internasional. Laporan Amnesty International tahun 2009, misalnya menyatakan bahwa pembatasan ketat pada kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat; penolakan hak proses hukum; penggunaan regulasi tentang pencemaran nama baik dan tindakan pembatasan secara sistematis, serta kontrol yang ketat pada kegiatan politik independen, undang-undang keamanan internal dan hukum pidana yang mengizinkan penahanan berkepanjangan tersangka tanpa pengadilan telah mengabaikan aktivis oposisi, pembela hak asasi manusia, media asing dan penentang yang teliti. Iklim ketakutan dan sensor ketat negara Singapura tidak mendorong Singapura sepenuhnya berpartisipasi dalam urusan publik'⁹⁴

Adanya penahanan tanpa pengadilan berdasarkan ISA telah menyebabkan masalah bagi pemerintah Singapura untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 dan menentang ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights - UDHR). Undang-undang yang dinilai kejam tersebut juga telah membuat masalah bagi pembentukan Komisi HAM Nasional – yang telah lama didirikan di negara tetangga Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina dan dalam proses pembentukan dalam kelompok regional ASEAN. Lily Zubaidah Rahim menilai penggunaan ISA oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam pelaksanaannya, UU Keamanan Dalam Negeri ini (ISA) dapat tertutupi dengan adanya UU “Legislation Against Subversion”, pada pasal 149 yang menyebutkan bahwa: tindakan dapat diambil baik di dalam maupun di luar Singapura apabila:

- 1) Menyebabkan masyarakat takut dan kekerasan terorganisir terhadap orang lain.
- 2) Tindakan/kegiatan yang dapat membangkitkan ketidakpuasan terhadap presiden atau pemerintah.
- 3) Tindakan yang memprovokasi permusuhan antar ras, kelas-kelas tertentu dan cendrung menimbulkan kekerasan.
- 4) Tindakan untuk mendapatkan perubahan dengan cara yang bertentangan.
- 5) Kegiatan/tindakan yang merugikan keamanan Singapura.

Undang-undang ini berdampak pada pembatasan kebebasan dalam berbicara, berkumpul dan berserikat. Untuk melengkapi pasal 149 maka pada ISA terdapat penjelasan bahwa, tindakan akan diambil apabila terjadi peristiwa/tindakan kekerasan terorganisir yang menyebabkan sebagian warga menjadi takut, dan dapat merugikan keamanan Singapura.

⁹⁴. Laporan Amnesti Internasional, 2009.

Ada kalangan yang menilai bahwa ISA merupakan regulasi yang kejam dan mengekang kebebasan, termasuk kebebasan dalam menjalankan agama. Namun demikian, ketika salah seorang responden penelitian ini ditanya pandangannya tentang hal ini, tanggapannya adalah sebagaimana berikut:

“ISA diterapkan di Singapura sebagai salah satu cara negara untuk menjaga stabilitas sosial dan menjaga harmoni antar umat beragama. ISA bukan hanya mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama saja, tetapi juga meliputi segala kegiatan yang dapat merusak keamanan, kegiatan yang menimbulkan permusuhan antar etnik dan ras, tindakan kekerasan dan semua tindakan yang dapat merugikan negara. Dengan adanya ISA pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan lancar tanpa ada gangguan”.

Hal yang tidak kalah menarik untuk di singgung dalam konteks ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Lily Zubaidah Rahim. Ia menjelaskan bagaimana kekangan pihak penguasa terhadap media massa di negara tersebut. Pemerintah mengambil tindakan terhadap pers dan media yang melanggar peraturan melalui Akta Percetakan Akhbar. Sebagai contoh, pada 1985, Asian Wall Street Journal telah dikenakan tuduhan menghina dan 1987, edaran FEER dikurangkan dari 9,000 menjadi 500 naskhah disebabkan laporannya tentang penahanan ISA pada tahun itu. Selain itu, edaran The Asian Wall Street Journal juga telah dibatasi dari 5,000 kepada 400 naskhah pada tahun 1987.

F.3. UU Hasutan (Sedition Act) dan UU Masyarakat (Society Act)

Regulasi lainnya yang cukup membelenggu dan menjadi senjata pemerintah untuk mengawal secara ketat pelaksanaan agama adalah UU Hasutan (Sedition Act) dan UU Masyarakat (Society Act). Sama dengan ISA, kedua undang-undang ini juga berasal dari pemerintahan kolonial Inggris. Dulu, undang-undang ini digunakan oleh Inggris untuk menentang komunis dan nasionalis radikal di era kolonial dan pasca-kolonial. Undang-Undang hasutan menyediakan tindak pidana yang berkaitan dengan ras dan kelas -termasuk mengotori tempat ibadah, mengganggu majelis agama, mengucapkan kata-kata atau suara, dan dengan sengaja melukai perasaan keagamaan. Hal demikian merupakan pelanggaran untuk mempromosikan perasaan permusuhan antara kelompok etnis yang berbeda atau kelas penduduk. Pada tahun 2005, tiga blogger dihukum berdasarkan Undang-Undang tersebut karena memposting komentar web-blog yang anti-Muslim. Pada tahun 2007, seseorang menerima peringatan keras karena memposting kartun yang menentang Yesus dan pada tahun berikutnya, beberapa orang juga kena karena mendistribusikan publikasi yang

menghasut dan tidak pantas untuk Muslim. Dalam publikasi ini, Islam disebut sebagai 'iman yang berbahaya'⁹⁵

Berdasarkan UU masyarakat (Societies Act), pendaftaran masyarakat tidak otomatis tetapi dengan penyelidikan oleh Panitera Societies. Persyaratan ini memberikan sarana yang kuat bagi pemerintah mengutuk kelompok agama yang dianggap merugikan perdamaian, kesejahteraan atau ketertiban sosial⁹⁶). Karena Societies Act melarang keterlibatan politik organisasi yang tidak secara khusus terdaftar untuk tujuan itu, hal itu secara efektif mengintimidasi dan mengancam aktor masyarakat yang tidak teregistrasi atau yang deregistrasi yang telah terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah. Kelompok agama yang telah berjalan dari agenda pembangunan bangsa yang dibuat pemerintah dan menderita deregistrasi termasuk Saksi Yehuwa (JW) dan Gereja Unifikasi, masing-masing dideregistrasi pada tahun 1972 dan 1982. Yang pertama deregistrasi karena pemerintah tidak mengakui keberatan hati nurani untuk dinas militer. Sampai saat ini, 26 Saksi-Saksi Yehuwa terus dipenjara karena menolak untuk mendaftarkan diri pada layanan wajib militer. Secara signifikan, deregistrasi melarang gereja-gereja ini mengadakan pertemuan publik. Pemerintah juga telah melarang semua materi tertulis yang diterbitkan oleh Saksi Yehuw.

G. Sekularisme Strategis dan Pragmatis

Manajemen agama menjadi perhatian penting bagi negara manapun yang mengaku menjadi sekuler. Hal ini sangat penting di negara-negara dengan populasi multi-agama dan multi-etnis. Karena potensi perubahan (fluktuasi dan instabilitas) yang melekat dalam agama, negara secara konsisten berusaha untuk mengatur agama untuk menjaga ketertiban sosial. Negara Singapura tidak berbeda; sebagai negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler.⁹⁷ Pemerintah PAP sungguh-sungguh mengadopsi sekularisme sebagai strategi untuk menjamin kelangsungan hegemoninya. Tidak diragukan lagi, Singapura telah menikmati sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan ini antara lain karena negara serius menganut sekularisme dan nilai-nilai multi-rasialisme dan multi-kulturalisme dan meritocracy.⁹⁸

Negara selalu memiliki kepentingan dalam mengelola Islam pada khususnya, terutama mengingat tumbuhnya ekstremisme Muslim di seluruh dunia. Kewaspadaan

⁹⁵ . Elena Chong, 'Couple Go on Trial for Sedition', Straits Times, 5 December 2008.

⁹⁶ . Ibid,

⁹⁷ . Kenneth Paul Tan, "Pragmatic Secularism, Civil Religion, and Political Legitimacy in Singapore," dalam *State and Secularism: Perspectives from Asia*, ed. Michael Heng Siam-Heng and Ten Chin Liew (Singapore: World Scientific Publishing, 2010), hlm. 341.

⁹⁸ . Komentari, Lee Kuan Yew, Mantan Perdana Menteri Singapura, dalam Mike Millard, *Jihad in Paradise: Islam and Politics in Southeast Asia* (Armonk, NY: ME Sharpe, 2004), hlm. 81.

yang tinggi dilakukan ketika berhadapan dengan Islam karena berbagai alasan. Pertama, karena sistem kepercayaannya yang luas (komprehensif), Islam berpotensi dapat digunakan sebagai titik kumpul terhadap beberapa kebijakan negara. Kedua, pemerintah benar-benar percaya bahwa peningkatan religiusitas Muslim berhubungan langsung dengan peningkatan aktivitas teroris. Ketiga, kondisi sosial ekonomi Muslim Singapura yang relatif tertinggal dibandingkan dengan komunitas agama lainnya dapat berpotensi menyebabkan ketidakpuasan terhadap negara, terutama mengingat geo-politik dan konteks sejarah Singapura.⁹⁹

Uraian di atas menggambarkan bahwa pemerintah menganut paham sekularisme strategis, sebagaimana dinyatakan George Yeo, menteri informasi, komunikasi dan seni: “Singapore’s government is secular, but it is certainly not atheistic”.¹⁰⁰ Singapura adalah sekuler, tetapi hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Singapura ateis karena faktanya lebih dari 90% penduduk Singapura memiliki keyakinan (agama), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Agama dan Afiliasi Kepercayaan di Singapura¹⁰¹

Kepercayaan Agama	Persentase
Kristen	18.8
Budha	33.2
Tao dan Kong Hu Cu	10
Islam	14
Hindu	5
Agama lain (Sikh, dll.)	0.5
Tidak Beragama	18.5
Total	100

Sumber: Sensus Penduduk Singapore 2010.¹⁰²

⁹⁹. Walid Jumblatt Abdullah, *Religious Representation in Secular Singapore: A Study of MUIS and Pergas*, hlm. 1-2.

¹⁰⁰. Lily Zubaidah Rahim, *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore’s Secular Authoritarian State*, hlm. 2

¹⁰¹. McKenzie Perkins, “Singapore, the Most Religiously Diverse Country in the World” dalam *Learn Religions*, 19 Agustus 2019, di <https://www.learnreligions.com/singapore-religion-4766642>, diaakses pada 28 November 2019.

Sementara itu, Pereira menjelaskan bahwa Singapura sebagai negara sekuler tidak berarti pengamalan agama tidak dibenarkan, melainkan punya makna bahwa negara tidak memiliki agama resmi. Konstitusi secara jelas menyebutkan bahwa agama merupakan masalah pribadi yang harus dipisahkan dari urusan politik. Berikut pernyataan Pereira:

“Singapore is officially a secular society. This does not mean that the practice of religion is disallowed; instead, Singapore is secular in so far as there is no official state religion, and the constitution state very clearly that religion is private issue which must be kept separate from politics”.¹⁰³

Meskipun di satu sisi negara bersifat sekuler –memposisikan agama sebagai persoalan pribadi dan terpisah dari ranah politik dan publik– namun di sisi lain pemerintah tetap memandang perlu mengatur urusan agama. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memandang perlu mengatur urusan agama. Pertama, karena mereka tak dapat mengabaikan kenyataan bahwa keragaman agama (multi-religi) tanpa pengelolaan dan pengaturan yang baik, cenderung menyebabkan ketegangan sosial (communal tensions) kalau bukan konflik sosial. Hal ini menjadi persoalan serius bagi pemerintah karena agama-agama atau apapun yang saling berbeda itu akan berhadapan dengan tuntutan menjaga “kemurnian” ajaran dan keyakinannya. Karena tuntutan itulah kemudian muncul di kalangan penganut agama yang berbeda itu sikap eksklusif yang tidak menerima kehadiran “the other”. Ketaatan dalam menjalankan agama kadang menciptakan pula jarak sosial tertentu, yang pada akhirnya dapat menguat menjadi kelompok sosial yang terpisah satu sama lain, seperti dikemukakan Nasir berikut ini:

“Our study shows that, other things being equal, the practice of religious piety will create a certain social distance between social groups and eventually these social divisions can harden into separate enclaves. The role of the state is to manage such social process in the interest of creating a social unity and where possible it should seek to convince its citizens that such social harmony is not simply artificial”.¹⁰⁴

Menyusul serangan teroris 11 September 2001 dan selanjutnya penahanan tersangka Jemaah Islamiah (JI) militan di Singapura, negara Singapura semakin waspada dalam membuat kebijakan terhadap komunitas Muslim lokal. Hal ini antara

¹⁰². Singapore Department of Statistics, Pers Release: Census of population 2010: Statistical Release 1 on Demographic Characteristics, Education, Language and Religion. Diakses pada 4 September 2013.

¹⁰³. Alexius A. Pereira, Religiosity and Economic Development in Singapore, *Journal of Contemporary Religion*, Volume 20, No.2, 2005. hlm. 161-178.

¹⁰⁴. Kamaludeen Mohamed Nasir, dkk. *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies*, hlm. 4.

lain dapat ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan pemahaman antar-agama melalui inisiatif seperti Lingkaran Antar-Keyakinan Agama (IRCC) dan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama (DRH). Kebijakan yang waspada terhadap komunitas Muslim sangat didorong oleh kekhawatiran bahwa fondasi sekuler negara-negara regional seperti Malaysia dan Indonesia telah ditumbangkan oleh 'Islamisasi' –ditunjukkan oleh kemampuan beberapa partai Islam dan organisasi untuk mencapai dukungan elektoral yang cukup, memperluas jangkauan syariah (hukum Islam) dan secara bertahap Islamisasi partai politik sekuler. Dihadapkan dengan trend Islamisasi global dan regional, legislasi dan pengawasan pemerintah yang diharapkan dapat melindungi negara kota tersebut dari serangan ideasional politik Islam.

Mempertahankan pengawasan yang ketat pada pengaruh regional dan internasional, pemerintah PAP bergerak sangat hati-hati terhadap ancaman yang dirasakan. Kebijakan pemerintah terhadap agama adalah dengan melakukan apa yang dibahasakan oleh Tan dengan 'pengawasan ketat, pengawasan intervensionis dan kepekaan ultra terhadap masalah keunggulan keamanan internal' sebagaimana catatan Tan, sejak 11 September 2001:

‘...close scrutiny, interventionist surveillance and ultra-sensitivity to internal security concerns are hallmarks of the government’s policy towards religion’.¹⁰⁵

Secara khusus, peningkatan tingkat religiusitas Muslim di Singapura dipandang sebagai masyarakat yang rentan terhadap propaganda Islam radikal.¹⁰⁶ Bahkan jika tidak rentan terhadap propaganda Islam radikal, religiusitas mereka saja sudah dianggap merugikan tatanan sosial masyarakat multiras misalnya lebih serius dalam menggunakan pakaian Muslim, dalam hal memilih makanan yang halal, ketaatan beragama, menjaga interaksi dengan non-Muslim sehingga dinilai membuat jarak dengan komunitas non-Muslim. Lee Kuan Yew, misalnya mencerminkan keprihatinan ini dengan memperingatkan Muslim pada tahun 2007 sebagai berikut:

‘over the last 3 decades many Muslims in Singapore and the region are becoming stricter in their dress, diet, religious observances, and even social interaction, especially with non-Muslims...My original concern was over the growing separateness of our Muslim community...’¹⁰⁷

Alasan kedua mengapa pemerintah perlu mengatur urusan agama adalah karena tak dapat dipungkiri bahwa agama memainkan peran yang sangat penting

¹⁰⁵ . Eugene K.B. Tan, ‘Norming “Moderation” in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore’, *Terrorism and Political Violence*, Vol.19. , 2007, hlm. 444.

¹⁰⁶ . Eugene K.B. Tan, ‘Norming “Moderation” in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore’, hlm. 444.

¹⁰⁷ . Eugene K.B. Tan, ‘Norming “Moderation” in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore’, hlm. 447.

dalam membentuk moralitas dan kewarganegaraan yang baik. Seperti dikemukakan Pereira, “agama telah dianggap sebagai sarana untuk memberikan panduan moral dan sarana melawan nilai-nilai negatif yang berhubungan dengan modernitas.”¹⁰⁸ Karena itu, pemerintah selalu menyisihkan ruang bagi organisasi keagamaan dan lahan untuk pembangunan rumah ibadah agama-agama besar seperti gereja, mesjid, dan tempat-tempat ibadah agama lainnya. Pembangunan rumah ibadah ini antara lain dilakukan di komplek rumah susun baru (flat) yang dibangun pemerintah.¹⁰⁹ Saat ini terdapat lebih kurang 22 mesjid yang telah dibangun di estet perumahan dengan Dana Pembinaan Mesjid (DPM) atau Mosque Building Fund (MBF). Yang terakhir ini merupakan sumbangan dari pekerja Muslim melalui pemotongan gaji mereka setiap bulan.

Singkatnya, pemerintah mengizinkan dan bahkan mendorong pengamalan agama selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan agar agama tidak masuk ke ranah politik dan selama tidak mengancam keharmonisan antar warga.¹¹⁰ Dengan alasan untuk menjaga keharmonisan antar warga negara yang multi-religi dan multikultural serta menjaga stabilitas sosial, maka pemerintah mengawasi secara ketat aktivitas-aktivitas keagamaan tersebut.

Pengaturan dimaksud terbukti dari kebijakan pemerintah yang mengintervensi manajemen Islam, Sikhisme, Hindu, dan lain-lain. Fakta ini dapat dilihat pendirian beberapa lembaga agama atau badan dan terus melakukan koordinasi dengan pejabat pemerintah dalam rangka membuat aturan dan mengawasi pelaksanaan agama.¹¹¹ Terkait Islam, MUIS adalah contoh nyata. Selain mengkoordinir pengumpulan dana untuk pembangunan mesjid melalui Dana Pembinaan Mesjid (DPM) atau Mosque Building Fund (MBF), pemerintah juga misalnya memberikan hari libur keagamaan. Selain itu, Konstitusi Singapura, di sisi lain, mengamankan diberlakukannya hukum keluarga (ahwal al-syakhsyiyah) dan pengadilan syariah bagi umat Islam.¹¹²

Karena itu, menurut Thio:

“ironis bila sementara dalam Akta Pemeliharaan Keharmonisan antar Agama (Maintenance of Religious Harmony Act /MRHA) menuntut agar urusan

¹⁰⁸. Alexius A. Pereira, 2005 ‘Religiosity and Economic Development in Singapore’, *Journal of Contemporary Religion*, Vol. 20, No. 2, hlm. 171-172.

¹⁰⁹. B. H. Chua, *Political Legitimacy and Housing: Stakeholding in Singapore*, (London: Routledge, 1997).

¹¹⁰. M. Hill & K.F. Lian, *the Politics of Citizenship and Nation Building in Singapore*, (London: Routledge, 1995).

¹¹¹. Eugene K.B. Tan, ‘Norming, “Moderation” in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore’.

¹¹². Wawancara dengan Dr. Isa Hassan, , Vice President III Jamiyah, pada tanggal 13 November 2015 di kantornya No. 32, Lorong 12 Geylang Singapore.

agama dipisahkan dari persoalan politik, dalam faktanya sikap pemerintah masih saja mengaitkan urusan agama dan kebijakan publik”.¹¹³

Pemerintah dalam hal ini mengatur pelaksanaan agama melalui badan atau institusi yang dibentuknya agar tidak terjadi sesuatu di luar keinginannya, seperti disharmoni atau disintegrasi sosial karena perbedaan agama. Sikap pemerintah semacam inilah yang dapat dilihat sebagai ‘sekularisme strategis’ pemerintah, kalau bukan sebuah sikap yang bersifat standar ganda (double standard).

Bagaimana sesungguhnya sikap negara terhadap Islam dan pemeluknya? Konstitusi Republik independen mencakup dua ketentuan mengenai kedudukan komunitas Melayu dan Islam, yaitu: Pasal 152 dan pasal 15.

Pasal 152 menyatakan:

- 1) Menjadi tanggung jawab Pemerintah terus-menerus untuk merawat kepentingan minoritas rasial dan agama di Singapura.
- 2) Pemerintah melaksanakan fungsi untuk memahami posisi khusus Melayu, yang merupakan penduduk asli Singapura, dan karena itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, melestarikan, mendukung, mendorong dan mempromosikan mereka di bidang politik, pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial dan budaya dan bahasa Melayu.

Pada praktiknya, pasal-pasal konstitusi independen ini bukanlah menganakemaskan etnis Melayu secara berlebihan, melainkan pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara penduduk asli dan pendatang secara proporsional. Dukungan pemerintah terhadap kepentingan minoritas Melayu-Muslim terlihat misalnya dalam pidato Perdana Menteri pada National Day Rally 2013 sebagaimana berikut:

“Singapura kini berada di satu titik peralihan. Dalam dunia yang sedang berubah, kita mahu Singapura terus menjadi titik merah yang bersinar-sinar. Setiap kita ada peluang untuk maju dan tingkatkan diri, di sekolah mahupun dalam kehidupan. Anda semua jangan bimbang tentang soal penjagaan kesihatan atau hari tua. Janganlah bimbang tentang perumahan. Setiap orang boleh miliki rumah sendiri yang dimampui. Kita perlu ada semangat kekitaan di sini. Singapura milik kita, untuk kita bangunkan dan banggakan. Bersama-sama, kita boleh lakukannya! Untuk capai matlamat ini, kita perlu mengubah beberapa dasar ke atas pendekatan kita. Negara perlu kukuhkan jaringan keselamatan sosial dan pupuk peluang-peluang lebih adil dan menguntungkan untuk semua rakyat Singapura. Sebagai sebuah masyarakat, kita harus lebih aktif, berusaha mengatasi keperluan sosial kita dan bantu satu sama lain. Perubahan dasar ini juga diterapkan dalam usaha untuk tingkatkan masyarakat Melayu-Islam. Pemerintah akan tambah usaha untuk perbaiki kehidupan semua

¹¹³. Li-ann Thio, Secularism, the Singapore Way, Straits Times, 30 Oktober 2007.

rakyat Singapura khususnya melalui perumahan, penjagaan kesihatan, dan pendidikan. Kita mahu baiki kehidupan keluarga susah. Setiap anak harus ada peluang baik untuk mulakan hidup mereka tidak kira latar belakang keluarga. Dasar-dasar ini adalah untuk semua masyarakat tetapi ada banyak faedah untuk masyarakat Melayu/Islam. Dasar-dasar kita ini akan membantu tingkatkan mobiliti sosial masyarakat Melayu/Islam dan membolehkan golongan susah keluar dari lingkaran kemiskinan.”¹¹⁴

Lebih jauh PM Lee juga menambahkan:

“Masyarakat Melayu-Islam adalah contoh baik bagaimana sebuah masyarakat yang aktif boleh berjaya mencapai sesuatu. Badan-badan Melayu/Islam misalnya sedang giat mengatasi keperluan sosio-ekonomi masyarakat. Forum Pemimpin Masyarakat atau CLF, bekerjasama dengan badan Melayu/Islam untuk melakar program yang efektif. Satu contoh ialah Rangkaian Keluarga AKRAB yang bantu keluarga bergaji rendah dan anak-anak mereka untuk majukan diri”¹¹⁵

H. Gairah Keberagamaan Muslim singapura

Salah satu tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana gairah keberagamaan di kalangan minoritas Muslim Singapura. Dengan menggunakan kerangka berpikir Stark dan Glock dikombinasikan dengan kerangka berpikir Riaz Hasan, berikut disajikan data dan analisis 5 (lima) dimensi inti keberagamaan mereka yaitu dimensi ideologis, dimensi ritual, dimensi pengalaman (*experiential*), dimensi intelektual/devosi, dan dimensi konsekuensi (*consequential*) dimensi ideologis.

Untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa jenis data dikumpulkan melalui kuesioner dikombinasikan dengan dokumentasi berupa laporan tahunan Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS), serta hasil observasi dan interview.

H.1. Dimensi Ideologis

Dimensi ini terdiri dari seperangkat kepercayaan yang wajib diyakini dan diimani oleh seorang Muslim. Kepercayaan yang paling sering disebut, dan karena itu dipilih untuk mengetahui daya tarik dan intensitas dimensi ideologis, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya hanya orang yang iman pada Nabi Muhammad yang masuk sorga, percaya pada mukjiizat Alquran, percaya pada

¹¹⁴ . Website Prime Minister Office Singapura, “Prime Minister Lee Hsien Loong’s National Day Rally 2013”, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2013. Pidato ini disampaikan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada tanggal 18 Agustus 2013 dan disiarkan melalui radio dan televisi Singapura.

¹¹⁵ . Ibid.

adanya iblis, percaya pada hari akhir/ hidup sesudah mati. Semua ini adalah kepercayaan yang asasi dan tujuan Iman. Dari 40 (empat puluh) orang responden yang ditanya terkait dimensi ieologi ini, jawaban mereka sebagaimana terlihat pada uraian berikut.

Percaya kepada Allah

Responden ditanya mana pernyataan dalam tabel berikut ini yang paling dekat dengan keyakinan mereka tentang kepercayaan pada Allah. Hasilnya 97% responden percaya benar tanpa ragu bahwa Allah itu ada; dan 3% menyatakan kadang-kadang percaya pada tuhan, di lain waktu tidak percaya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Percaya kepada Allah

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1	Saya percaya tuhan itu ada dan saya tidak ragu	97	97
2	Ketika saya susah, saya percaya pada tuhan	3	3
3	Di satu waktu saya percaya pada tuhan, di lain waktu tidak	-	
4	Saya tidak percaya akan adanya tuhan, tapi percaya pada kekuatan ghaib	-	
5	Saya tidak tahu apakah tuhan itu ada, dan saya tidak percaya ada cara untuk menemukannya	-	
6	Saya tidak percaya Tuhan itu ada	-	
7	Tidak ada jawaban yang sesuai dengan keyakinan saya tentang tuhan	-	
8	Jawaban yang lain	-	
	Jumlah	100	100

Percaya Kepada Malaikat

Iman pada malaikat adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari nur (cahaya) yang diberi tugas-tugas tertentu dan ia senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah. Iman kepada malaikat menjadi kewajiban Muslim. Dalam penelitian ini, responden ditanya tingkat keyakinannya bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat, dan bahwa malaikat diberi Allah tugas-tugas tertentu seperti membawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul; mencatat amal perbuatan manusia, memohon ampunan bagi orang-orang beriman; mencabut nyawa; dan sebagainya. Jawaban responden

menunjukkan 97% percaya sepenuhnya pada malaikat; sisanya 3 % ragu-ragu dengan menjawab mungkin benar bahwa malaikat itu ada. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Percaya pada Malaikat

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pasti benar	97	93
2	Mungkin benar	3	7
3	Tidak yakin	-	-
4	Mungkin tidak benar	-	-
5	Pasti tidak benar	-	-
6	Tidak tahu	-	-

Percaya pada Nabi Muhammad

Kesalehan beragama seorang Muslim mengharuskan adanya iman yang sempurna terhadap wahyu tuhan, dan karena itu wahyu akan membawa mereka ke jalan yang benar. Salah satu hal yang paling penting untuk diimani oleh setiap Muslim adalah bahwa Nabi Muhammad adalah sang penyelamat yang membawa dan menyampaikan risalah dari tuhan. Mengikuti dan mengamalkan sunnnah Nabi merupakan cara bagi Muslim yang saleh, dan karena itu ia mendapat keselamatan hidup di dunia dan hari akhir. Responden diminta untuk memilih mana pernyataan yang paling dekat dengan keyakinan mereka tentang keyakinan bahwa hanya orang yang iman pada Nabi Muhammad yang masuk surga. Jawabannya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Percaya hanya orang yang iman pada Nabi Muhammad yang masuk surga

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pasti benar	96	96
2	Mungkin benar	3	3
3	Tidak yakin	1	1
4	Mungkin tidak benar	-	-
5	Pasti tidak benar	-	-
6	Tidak tahu	-	-

Tabel di atas menunjukkan 96% meyakini hanya orang yang beriman pada Nabi Muhammad yang masuk surga, 3% ragu-ragu dengan menjawab mungkin benar bahwa hanya orang yang beriman pada Nabi Muhammad yang masuk surga, dan sisanya 1% tidak yakin bahwa hanya orang yang beriman pada Nabi Muhammad yang masuk surga.

Percaya pada mukjizat sebagaimana dikisahkan Alquran

Alquran banyak bercerita tentang mukjizat, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya. Responden ditanya tentang keyakinannya pada mukjizat sebagaimana dikisahkan dalam Alquran. Jawabannya 92% percaya mukjizat terjadi seperti yang diceritakan Alquran; 8% lainnya percaya mukjizat dapat dijelaskan melalui hukum alam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Percaya pada mukjizat Alquran

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1	Saya percaya mukjizat terjadi seperti yang diceritakan Alquran	92	92
2	Saya percaya mukjizat dapat dijelaskan melalui hukum alam.	8	8
3	Saya tidak percaya mukjizat	-	-

Percaya pada hari akhir

Salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam Islam adalah beriman pada hari akhir. Iman pada hari akhir secara umum berarti meyakini bahwa alam semesta dengan segala isinya akan mengalami kehancuran pada suatu saat nanti dan mempercayai bahwa akan ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia ini.

Dalam studi ini, responden diminta untuk menunjukkan seberapa yakin mereka dengan kehidupan sesudah mati. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas Muslim Singapura (98%) percaya pada hari akhir/hidup sesudah mati sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Percaya pada hari akhir/ hidup sesudah mati

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pasti benar	98	98
2	Mungkin benar	2	2
3	Tidak yakin	-	-
4	Mungkin tidak benar	-	-
5	Pasti tidak benar	-	-
6	Tidak tahu	-	-

Indeks Ortodoksi

Data di atas digunakan pula untuk menilai ortodoksi dimensi ideologis Muslim Singapura. Indeks ortodoksi dihasilkan dengan menggunakan metode pemberian nilai satu untuk alternatif jawaban yang pertama seperti: saya percaya tuhan itu ada dan saya tidak ragu; pasti benar bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat; pasti benar bahwa hanya orang yang iman pada Nabi Muhammad yang masuk surga; pasti benar; saya percaya mukjizat terjadi seperti yang diceritakan Alquran; pasti benar bahwa ada kehidupan sesudah mati. Sementara alternatif jawaban lainnya diberi nilai nol. Dengan menggunakan penilaian seperti ini, indeks ortodoksi ideologis dihasilkan.

H.2. Dimensi Ritual –Praktek Ibadah

Islam merupakan agama yang kaya dengan ritual. Orang Islam dituntut untuk melaksanakan ritual sebagai kewajiban dan ekspresi keimanan mereka. Ibadah ritual merupakan pondasi awal untuk membentuk karakter yang bersinergi dengan ibadah dan kesalehan sosial. Empat ritual agama yang biasa dilakukan umat Islam digunakan untuk menilai gairah keberagamaan mereka dilihat dari dimensi ritual, yaitu melaksanakan shalat lima waktu; puasa di bulan Ramadhan; membayar zakat; dan menunaikan haji.

Melaksanakan Shalat Lima Waktu

Setiap muslim yang sudah dewasa diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam sebagai kewajiban agama. Dalam penelitian ini responden ditanya tentang intensitasnya mendirikan shalat. Jawaban mereka menunjukkan tingginya gairah pelaksanaan shalat wajib lima waktu sehari semalam di kalangan Muslim Singapura sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 6
Melaksanakan shalat 5 Waktu Sehari Semalam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lima kali sehari atau lebih	91	91
2	Satu sampai empat kali sehari	4	4
3	Hanya shalat Jumat	2	2
4	Hanya saat tertentu	3	3
5	Tidak pernah	-	-
6	Kadag-kadang	-	-

Puasa di bulan Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban Muslim yang jumlah harinya antara 29 hingga 30 hari. Allah menjanjikan pahala yang berlimpah bagi yang melaksanakannya, juga dapat menghapus kesalahan dan mengampuni dosa yang sebelumnya. Namun harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan ridha Allah. Dalam studi ini, responden ditanya tentang intensitasnya dalam melaksanakan puasa Ramadhan. Hasilnya menunjukkan relatif tingginya gairah pelaksanaan puasa Ramadhan di kalangan mereka sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Melaksanakan Puasa

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Puasa penuh sebulan Ramadhan, dan mengganti di hari lain bila ada halangan sesuai syariat	79	79
2	Puasa lebih dari 20 hari sepanjang Ramadhan tapi tidak mencapai sepuh Ramadhan, dan tidak mengganti yang tertinggal di luar Ramadhan	8	8
3	Puasa antara 15-20 hari selama Ramadhan dan tidak mengganti yang tertinggal di luar Ramadhan	6	6
4	Puasa di bawah 15 hari selama Ramadhan dan tidak mengganti yang tertinggal di luar Ramadhan	7	7
5	Sama sekali tidak berpuasa di bulan Ramadhan	-	-

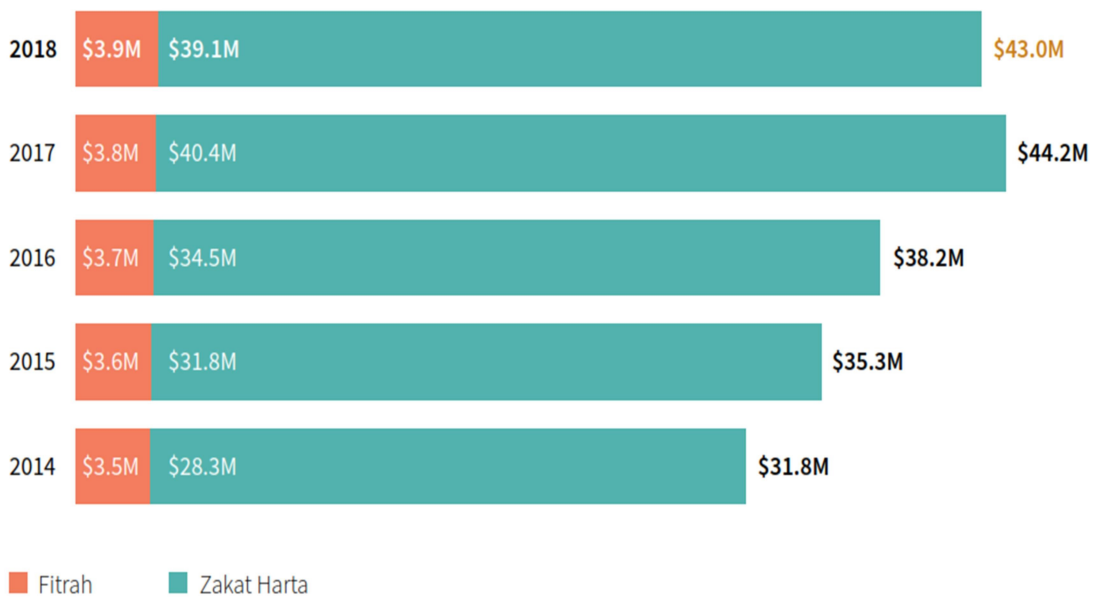
Membayar Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh Muslim kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin dan lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat adalah rukun Islam ke-4 dan menjadi salah satu unsur penting dalam menegakkan syariat Islam. Zakat terdiri dari dua jenis: zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta). Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan, Sedangkan Zakat harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil ternak, hartatemuan, emas dan perak yang masing-masing memiliki penghitungannya sendiri. Dalam penelitian ini, responden ditanya apakah mereka menunaikan zakat. Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Membayar zakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	95	95
2	Tidak	5	5

Sejalan dengan jawaban responden sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, MUIS juga melaporkan intensitas dan peningkatan jumlah zakat dari tahun ke tahun yang terhimpun dari Muslim Singapura. Tahun 2011, terhimpun zakat mal sejumlah \$23.300.000,. Jumlah ini terus meningkat seperti tergambar pada tabel dan grafik berikut.



Pada tahun 2014 terhimpun sejumlah \$31.800.000; tahun 2015 meningkat secara signifikan menjadi \$35.300.000; begitu juga pada tahun 2016 menjadi \$38.200.000; tahun 2017 naik lagi menjadi \$44.200.000; dan di tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 43.000.000.¹¹⁶

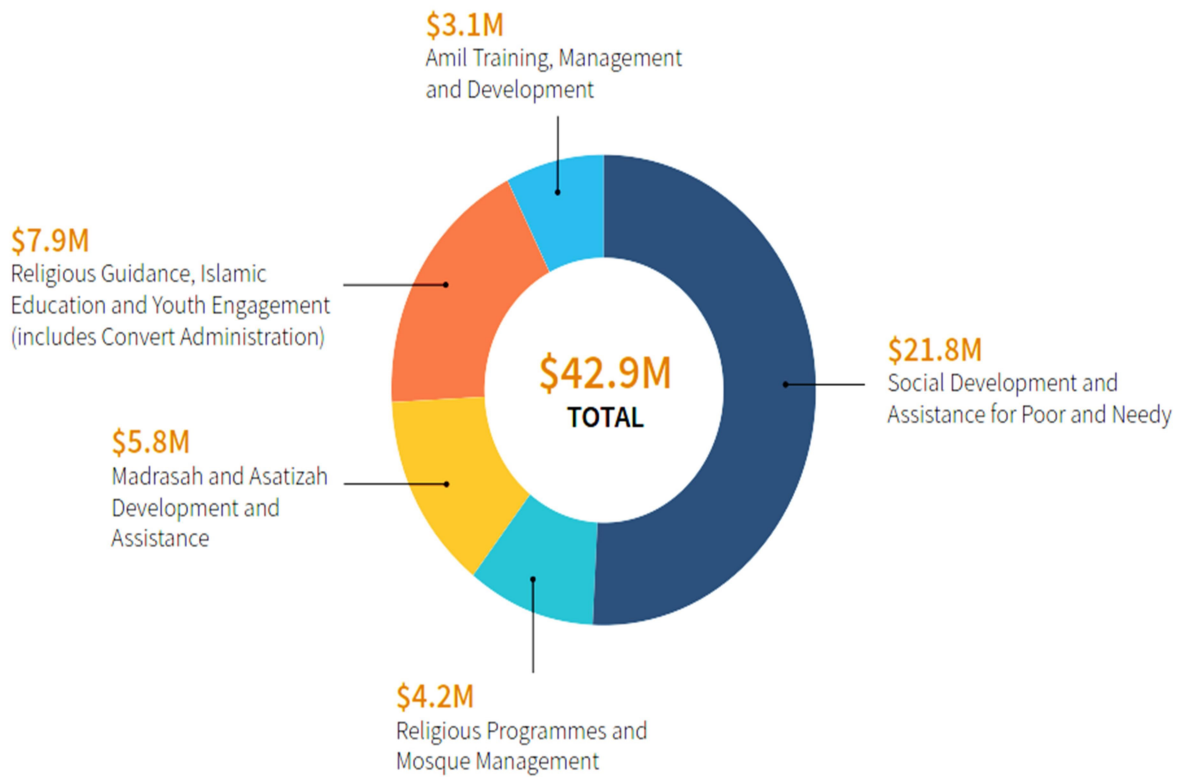
Pada grafik di atas juga terlihat peningkatan jumlah zakat fitrah dari tahun ke tahun. MUIS berhasil menghimpun zakat fitrah dari Muslim Singapura tahun 2014 sejumlah \$3.500.000; tahun 2015 meningkat menjadi \$3.600.000; tahun 2016 naik lagi menjadi \$3.700.000; tahun 2017 menjadi \$3.800.000; dan di 2018 meningkat menjadi \$3.900.000.¹¹⁷

Dana zakat ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan syiar Islam dan Muslim. Tabel berikut menggambarkan rincian penggunaan dana zakat tahun 2018 sebesar \$42.900.000. Dimana \$3.100.000 digunakan untuk pelatihan, manajemen dan pengembangan amil mesjid; \$7.900.000 dimanfaatkan untuk kegiatan bimbingan agama, pendidikan Islam, dan ketelibatan pemuda termasuk administrasi konversi agama; \$5.800.000 untuk bantuan madrasah dan pengembangan sumber daya asatizah, \$4.200.000 untuk kegiatan agama dan pengelolaan mesjid, dan sisanya \$ 2.100.000 untuk bantuan sosial bagi orang miskin dan yang membutuhkan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.¹¹⁸

¹¹⁶ Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), "Striving with Convindence Serving with Compassion", Annual Report 2018, hlm. 50.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid. hlm. 51.



Pelaksanaan Haji dan Umrah

Gairah Muslim Singapura dalam pelaksanaan haji dan umrah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kuota jemaah haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi untuk setiap tahunnya serta semakin lamanya waktu daftar tunggu (waiting list) keberangkatan bagi calon jemaah yang sudah mendaftarkan diri. Dari Laporan Tahunan MUIS¹¹⁹ diperoleh data sebagaimana dalam tabel berikut.

¹¹⁹. MUIS Annual Report 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Tabel 9
Jumlah Jemaah Haji 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Jemaah Haji
1	2015	680 orang
2	2016	680 orang
3	2017	800 orang
4	2018	850 orang
5	2019	900 orang

Meskipun jumlah kuota calon jemaah haji telah ditambahkan oleh pemerintah Arab Saudi, namun tetap masih banyak yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list). Bahkan ada yang perlu menunggu sampai 17 tahun. Muslim muda disinyalir banyak yang berada di dalam waiting list tersebut.

I. Memupuk Gairah Keberagamaan Melalui Kegiatan Akademik dan Sosial

Tidak seperti di Indonesia yang menempatkan pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional, di Singapura tidak ada pelajaran agama dalam kurikulum sekolah pemerintah. Pendidikan Islam dapat diperoleh secara formal melalui full time madrasah, atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh sejumlah institusi providers dan masjid. Saat ini ada 6 (enam) madrasah full-time yang diberi izin menyelenggarakan pendidikan formal dan ijazahnya diakui setara dengan ijazah sekolah pemerintah, yaitu Madrasah Al-Juneid Al-Islamiah, Madrasah Alsaggof Al-Arabiyah, Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiah, Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah, Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah, dan Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah. Namun demikian, ada batasan kuota penerimaan siswa di madrasah ini. Karena itu, siswa yang tidak belajar di full time madrasah ini, dapat mengakses pelajaran agama di part time madrasah yang diselenggarakan pada saat week end, seperti yang dikelola oleh Andalus. Dengan demikian, siswa yang belajar di sekolah pemerintah, dapat belajar agama melalui lembaga ini. Seperti full-time madrasah, part time madrasah juga menyediakan pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas. Selain itu, hampir setiap mesjid, juga menawarkan kelas pembelajaran agama yang dikelola secara professional.

Pendidikan agama yang bersipat part-time juga tersedia untuk tingkat pendidikan tinggi, mulai dari level pra diploma, diploma dan sarjana. Pra diploma menawarkan pembelajaran dasar-dasar agama yang dipandang mesti dikuasai sebelum seseorang melanjutkan ke level Diploma. Biasanya yang memilih program ini adalah yang merasa belum memiliki ilmu-ilmu dasar keagamaan yang kuat.

Data di lapangan menunjukkan tingginya minat dan gairah Muslim Singapura untuk belajar dan mengakses pendidikan Islam. Saat ini terdapat sekitar 60.000 anak muda berumur 5 sampai 20 tahun yang mengikuti program pendidikan Islam di mesjid-mesjid, organisasi-organisasi Islam dan lembaga swasta. Selain itu, ada 13.000 orang dewasa yang juga terlibat dalam proses pendidikan Islam dalam berbagai program dan level pendidikan Islam. Di full-time madrasah, sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah, terdapat lebih kurang 4000 siswa berusia 7 hingga 18 tahun. Sementara pelajar dewasa yang terdaftar belajar di berbagai jenis program pendidikan Islam mencapai 13.000 dari 33.000 Muslim yang berusia 21-35 tahun.¹²⁰ Selain itu, juga terdapat orang dewasa usia di atas 35 tahun yang belajar di kelas-kelas pembelajaran yang diselenggarakan di Mesjid. Yang menarik adalah bahwa pelajar Muslim yang belajar agama pada program part time di level pendidikan tinggi baik program pra diploma, diploma maupun program sarjana adalah mereka yang sedang kuliah dalam bidang non agama di kampus perguruan tinggi umum seperti NUS, NTU, dan lain sebagainya atau mereka yang sudah bekerja dalam berbagai bidang. Dengan demikian, tujuan mereka belajar, bukan untuk kepentingan duniawi seperti untuk memperoleh pekerjaan, melainkan semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan agama dalam rangka memenuhi tujuan menjadi pemeluk Islam yang baik.

Selain melalui pendidikan, berbagai upaya lainnya juga dilakukan oleh MUIS melalui berbagai program dan kegiatan baik yang bersifat akademik seperti seminar, sarasehan, workshop, training, tabligh akbar dengan menghadirkan muballigh atau nara sumber luar, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada yang lemah, buka puasa bersama, pemberian grand dan award, beasiswa luar negeri untuk studi Islam, penguatan lembaga dan organisasi Islam, memperkuat parthnership, dan lain sebagainya¹²¹ yang arahnya adalah untuk memupuk gairah keberagamaan Muslim Singapura serta mewujudkan identitas Muslim Singapura sebagaimana berikut: 1). Berpegang teguh pada prinsip Islam sambil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 2). Kuat secara moral dan spiritual berada di atas tantangan masyarakat modern. 3). Bersifat progresif, mengamalkan Islam yang tidak hanya sebatas ritual dan mengendalikan gelombang modernisasi. 4). Mengapresiasi sejarah dan peradaban Islam dan memahami dengan baik isu-isu kontemporer 5). Menghargai peradaban lain dan percaya diri untuk berinteraksi dan belajar dari komunitas lain. 6). Yakin bahwa Muslim yang baik adalah warga Negara yang baik. 7). Beradaptasi dengan baik sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi di negara sekuler dan multi agama. 8). Menjadi berkah bagi semua dan mempromosikan prinsip

¹²⁰ . MUIS, MUIS50 Conversation, Striving With Confidence, Serving With Compassion, Connect, Consult, Co Create, 2018, hlm. 41.

¹²¹ . MUIS Annual Report, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

dan nilai-nilai universal. 9). Bersifat Inklusif dan mengamalkan pluralism tanpa merongrong Islam. 10). Menjadi model dan inspirasi bagi yang lain.¹²²

J. Kesimpulan dan Penutup

Pemerintah memproklamirkan Singapura sebagai negara sekuler. Ada banyak model negara sekuler, mulai dari bentuk ekstrim yang anti agama atau yang merendahkan agama ke ruang privat sampai ke model sekuler yang lebih “liberal” yang masih mengakui peran agama dalam kehidupan publik dan sedikit campur tangan dalam masalah agama. Sekularisme dalam konteks Singapura adalah memposisikan agama sebagai persoalan pribadi dan terpisah dari ranah politik dan publik— namun di sisi lain pemerintah tetap memandang perlu mengelola dan mengatur urusan agama.

Dalam rangka mengelola agama, pemerintah Singapura menggunakan berbagai teknik. Satu diantaranya adalah dengan cara melakukan kooptasi terhadap badan dan organisasi keagamaan baik secara formal maupun informal untuk membantu memainkan peran pemerintah dalam mengelola agama. Sehingga tidak terlihat pemerintah mengelola agama secara langsung. Kooptasi dalam hal ini tidak berarti hubungan tunduk atau seluruh prosesnya negatif; melainkan sebuah strategi yang sering digunakan oleh negara maupun badan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekali lagi, baik negara maupun lembaga yang dikooptasi sama-sama berupaya mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.

Kooptasi secara formal (institusional) dan sekaligus informal (ideologis dan psikologis) dilakukan pemerintah terhadap MUIS. MUIS adalah birokrasi agama yang disponsori negara dengan status badan hukum yang memusatkan perhatian pada urusan Muslim. MUIS berperan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam di madrasah baik yang full time madrasah maupun part time madrasah; mengelola hampir 100 mesjid; mengelola dana pembangunan Mesjid/Mosque Building Fund (MBF) yang mengumpulkan sumbangan dana dari pekerja Muslim Singapura untuk membangun dan pemeliharaan mesjid dan madrasah; mengelola pengumpulan zakat, tanah wakaf; serta mengelola pelaksanaan haji dan umrah. Selain itu, MUIS juga memiliki wewenang untuk menyetujui calon komite manajemen mesjid dan menyediakan teks khutbah Jumat.

Selain kooptasi secara formal dan informal kepada MUIS, pemerintah juga melakukan kooptasi informal (ideologis dan psikologis) kepada Pergas dalam mengelola agama. Peran penting yang dilakukan oleh Pergas adalah membina asatizah yang dalam konteks ini tidak hanya berarti para da'i, tetapi juga para "intelektual, ulama dan pemimpin masyarakat Muslim. Fungsi penting Pergas adalah melakukan administrasi Asatizah Recognition Scheme (ARS), atau sederhananya adalah sertifikasi asatizah. Skema ini sudah diatur oleh MUIS, dengan tujuan

¹²² . MUIS, Annual Report 2017, hlm. 7.

menghindarkan mereka dari radikalisme, militanisme, ekstrimisme dan ajaran agama yang menyimpang. Melalui ARS, hanya mereka yang bersertifikat yang diperbolehkan untuk mengajar ilmu agama Islam di Singapura. Meskipun inisiatif dari MUIS, Pergas dipercayakan mengelola skema ini. Karena itu, Pergas memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang dapat atau tidak dapat mengajarkan Islam di Singapura, berdasarkan pedoman tertentu.

Dengan demikian, kooptasi terhadap organisasi keagamaan terutama karena kekhawatiran pemerintah terhadap pertumbuhan ekstrimisme dan radikalisme Islam serta menghindari resistensi terhadap hegemoni politiknya serta menjaga peace and harmony dalam masyarakat multi religi dan multi etnis.

Cara kedua yang dilakukan negara/pemerintah Singapura dalam mengelola agama adalah dengan mengatur dan mengawasi pelaksanaan agama dengan penerapan hukum yang keras dan ketat seperti pemberlakuan Undang-undang Harmony Beragama (Maintenance of Religious Harmony Act/MRHA), Undang-undang Hasutan (Sedition Act), dan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act) yang antara lain diarahkan untuk membatasi politisasi agama dengan mencoba memisahkan agama dari politik, mengatur kegiatan keagamaan, dan menahan perkembangan masyarakat sipil Muslim yang otonom. Cara kedua ini menggambarkan sifat otoritarianisme Singapura.

Dengan demikian, Singapura menganut paham sekularisme strategis dan pragmatis. Meskipun pemerintah mengakui bahwa agama memberikan kontribusi positif baik bagi kehidupan manusia secara pribadi maupun bagi pembangunan bangsa, pemerintah tetap memiliki paradigma yang memandang agama perlu terpisah dari negara. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur oleh negara. Dengan demikian agama tak bisa mengatur atau mempengaruhi negara. Sekularisme dengan demikian diartikan sebagai pemisahan kehidupan bermasyarakat dan segala yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan dari masalah keagamaan, atau secara sederhana sekularisme dimaknai sebagai pemisahan agama dan politik.

Deklarasi versi Singapura tentang sekularisme dengan demikian berbeda dari negara lain, utamanya dalam prakteknya terhadap pengelolaan Islam dan penerapannya pada komunitas Muslim. Pemerintah Singapura tidak secara langsung mengelola agama, namun menggunakan berbagai cara dalam mengelola agama.

Terlepas dari deklarasi sekularisme dan otoritarianisme negara Singapura yang ditunjukkan dengan pengelolaan, pengaturan dan pengawasan secara ketat pelaksanaan agama di Singapura, Muslim Singapura memperlihatkan gairah yang tinggi dalam pengamalan Islam serta tingkat kesalehan beragama yang tinggi baik dalam dimensi ideologis, dimensi ritual, dimensi experiential, maupun dimensi intelektual.

Banyak cara yang ditempuh Muslim Singapura untuk memupuk gairah keberagamaan mereka baik yang bersifat akademik maupun sosial. Pendidikan formal maupun informal telah memberikan kontribusi yang besar dalam memupuk gairah

keislaman mereka. Selain itu, program dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MUIS juga sangat efektif dalam mewujudkan identitas Muslim Singapura sebagai Muslim progresif, inklusif dan kuat secara moral dan spiritual di tengah tantangan modernitas dan mampu secara meyakinkan bergandengan tangan dan bekerjasama dengan komunitas lain di negara sekuler yang multi religi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-1993, Hamburg: Abera Verlag, 1997.
- Abdillah, Masykuri, “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi”, Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
- Abdullah, Walid Jumblatt , Religious Representation in Secular Singapore: A Study of MUIS and Pergas, Thesis at Department of Political Science, National University of Singapore, 2012.
- Abraham, Ibrahim , ‘Hijab in an Age of Fear: Security, Secularism and Human Rights’, Australian Religious Studies Review, Vol.19, No.2, 2006.
- Asad, Talal , Formation of Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford: Stanford University Press, Azeez, Rizwana Abdul, Creating a Modern Singapore Muslim Community: A Tale of Language Dissonance, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014.
- Azeez, Abdul, Creating a Modern Singapore Muslim Community: A Tale of Language Dissonance, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014), diakses dari https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/iseas_working_papers_2014_2.pdf
- Bell, Chaterine, Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.
- Berger, Peter L., et al., The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999.
- Chong, Elena, ‘Couple Go on Trial for Sedition’, Straits Times, 5 December 2008.
- Chua, B. H., Political Legitimacy and Housing: Stakeholding in Singapore, London: Routledge, 1997.
- Cormode, D. Scott, “Review Essay: Religion and the Non-Profit Sector,” Non-profit and Voluntary Sector Quarterly, 23 (1994).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005

- Department of Statistics Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore, Population Trends, dalam file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/population2018.pdf
- Department of Statistics Singapore, Singapore in Figures 2018, Diunduh tanggal 31 Agustus 2018 melalui: <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/reference/sif2018.pdf>
- Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998.
- Eisenstadt, S.N., "Multiple Modernities," *Daedalus*, Winter 2000.
- Hall, Peter Dobkin, "A Historical Overview of the Private Nonprofit Sector," in *The Non-Profit sector: A Research Handbook*, ed. Walter W. Powell, New Haven: Yale University Press, 1987.
- Hang, Tey Tsun, Excluding Religion from Politics and Enforcing Religious Harmony -Singapore Style, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2008.
- Hassan, Riaz, *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society*, (terj. Jajang Jaahroni, dkk.), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hashemi, Nader, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*, Oxford, New York: Oxford University Press, 2009.
- Hefner, Robert W. (ed.), *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, University of Hawaii Press, Honolulu, 2001.
- Helmiati, Implementasi Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Singapura, Laporan penelitian, LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- Huat, Chua Beng, *Political Legitimacy and Housing, Stake holding in Singapore*, New York: Taylor & Francis e-Library, 2002.
- Hill, M., & K.F. Lian, *The Politics of Citizenship and Nation Building in Singapore*, London: Routledge, 1995
- Imarah, Muhammad , *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Jadidah, 1979.
- Kadir, Suzaina, 'Islam, State and Society in Singapore', *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol.5, No.3, 2004.
- , 'Muslim Politics, the State and Society', dalam Kenneth Paul Tan (ed.), *Renaissance Singapore? Economy, Culture and Politics*, Singapore: NUS Press, 2007.
- Kaviraj, Sudipta, "An Outline of a Revisionist Theory of Modernity," *European Journal of Sociology*, Vol. 46, No. 3 2005.

- Millard, Mike, *Jihad in Paradise: Islam and Politics in Southeast Asia*, Armonk, NY: ME Sharpe, 2004.
- Lincoln, Bruce, *Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11*, Chicago: University of Chicago Press, 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii , “ Islam as Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia”, disertasi doktor, University of Chicago, 1983.
- Millard, Mike, *Jihad in Paradise: Islam and Politics in Southeast Asia*, Armonk, NY: ME Sharpe, 2004.
- Mahfudz, Sahal , *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994
- Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, *Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality*, Routledge, 2003.
- Mathew, Mathews, *Understanding Religious Freedom in Singapore*, *Journal Review of Faith & International Affairs*, Volume 11, 2013 - Issue 2.
- Miller, David, *On Nationality*, Oxford: Oxford University Press, 1995
- Mutalib, Hussin , *Singapore Malays, Being Ethnic Minority and Muslim in a Global City-State*, Routledge Contemporary Southeast Asia Series, New York, 2012.
- , “Constructing a Constructive Opposition,” dalam Bridget Welsh, James Chin, Arun Mahizhnan and Tan Tam How (eds.), *Impressions of the Goh Chok Tong Years in Singapore*, (Singapore: NUS Press, 2009.
- Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) Annual Report 2015, “Strengthening Institutions Empowering Community“,
- Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) Annual Report 2016, “Strengthening Our Institutions Harnessing Our Assets“.
- Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) Annual Report 2017, “Shaping Religious Life“.
- Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) Annual Report 2018, “Striving with Confidence Serving with Compassion“.
- MUIS, *MUIS50 Conversation, Striving With Confidence, Serving With Compassion, Connect, Consult, Co Create*, 2018.
- Nasir, Kamaludeen Mohammed, Alexius A. Pereira, & Bryan S. Turner, *Muslim In Singapore: Piety, Politics and Policies*, New York: Routledge, 2010
- Najam, Adil, “The Four C’s of NGO-Government Relations: Complementarity, Confrontation, Cooperation, Co-optation,” *LEAD-Pakistan Occasional Paper No. 11*, 2000.
- Osman, Mohammad Nawab Mohamed, *The Religio-Political Activism of Ulama in Singapore*, *Journal Indonesia and the Malay World*, Volume 40, 2012, issue 116.

- Phillips, Anne , Multiculturalism without Culture, Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Parekh, Bikhu , Rethinking Multiculturalism. Harvard., 2001
- Perkins, McKenzie, "Singapore, the Most Religiously Diverse Country in the World" dalam Learn Religions, 19 Agustus 2019, di <https://www.learnreligions.com/singapore-religion-4766642>, diaakses pada 28 November 2019.
- Pereira, Alexius A., Religiosity and Economic Development in Singapore, Journal of Contemporary Religion, Volume 20, No.2, 2005.
- Piscatori, James P., Islam in a World of Nation State, Cambridge; Cambridge University Press, 1986.
- Rahim, Lily Zubaidah, Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State, Murdoch University and Asia Research Centre, Perth, Western Australia , 2009.
- , Governing Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State, working paper No. 156, Asia Research Centre, Juli 2009.
- Rosta, Gergely , "Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe", dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm>
- Smith, Donald Eugen , Religion and Political Development, Boston: Little Brown and Company, 1970.
- Sinha, Vineeta, Theorizing 'Talk' about 'Religious Pluralism' and 'Religious Harmony' in Singapore, Journal of Contemporary Religion, September 2010.
- Stack, R dan C.Y. Glock, American Piety, and the Nature of Religious Commitment, (Berkeley: University of California, 1968.
- Stepan, Alfred, "The Multiple Secularism of Modern Democratic and Non Democratic Regimes", paper dipresentasikan pada American Political Science Meeting in Washington D.C., September 2010, hlm. 1-3. Diakses pada 20 Jun 2019 melalui file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/SSRN-id1643701_3.pdf
- , The World's Religious Systems and Democracy: Crafting The "Twin Tolerations", di [https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project Manager - Constitution Process - Governance.EML/](https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project%20Manager%20-%20Constitution%20Process%20-%20Governance.EML/), hlm. 6-7.
- Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.
- Tan, Kenneth Paul, "Pragmatic Secularism, Civil Religion, and Political Legitimacy in Singapore," dalam "State and Secularism: Perspectives from Asia, ed.

- Michael Heng Siam-Heng and Ten Chin Liew, Singapore: World Scientific Publishing, 2010.
- Tan, Charlene, Creating „Good Citizens“ and Maintaining Religious Harmony in Singapore, British Journal of Religious Education, Volume 30, 2008 - Issue 2
- Tan, Eugene K.B. ‘Norming “Moderation” in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore’, Terrorism and Political Violence, Vol.19. , 2007.
- Taylor, Charles , A Secular Age, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Thio, Li-ann, Secularism, the Singapore Way, Straits Times, 30 Oktober 2007. Human Right Watch, Country Summary, Singapore, January 2009, tersedia di http://www.hrw.org/sites/default/files/relate_material/Singapore.
- Amnesty International Report 2009, May 2009, tersedia di <http://www.amnesti.org>
- Report of the Constitutional Commission, 1966 (Chairman: Wee Chong Jin), Singapore: Printed by the Government Printer, 1966), OCLC51640681. Para.38.
- Prime Minister Lee Hsien Loong’s National Day Rally Speech 2009 on 16 August (transcript), tersedia di <https://www.pmo.gov.sg/newsroom/prime-minister-leehsien-loongs-national-day-rally-2009-speech-english>. Diakses tanggal 10 September 2018. “Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore”, Islam Online-net.
- <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-AlienateMuslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013.
- The Encyclopedia of Religion, vol. 13, New York: Macmillan Publishing Compan.
- <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/07/24/pcd1cg384-banyak-muslim-muda-singapura-tertarik-berhaji>, diakses tanggal 10 September 2018.
- <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/03/17/o45ygv313-sumbanganwajib-muslim-singapura-alami-kenaikan>, diakses tanggal 10 September 2018. <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/09/09/nuddn3313-muslim-singapura-salurkan-2-ton-beras-untuk-dhuafa-di-aceh>, dan
- <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/10/07/nd1mx9muslim-singapura-pilih-salurkan-daging-kurban-ke-luar-negeri>, diakses tanggal 10 September 2018.
- <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/04/29/mm097igeliat-zakat-di-singapura-meningkat>, diakses tanggal 10 September 2018.

“Belajar dari Cara Singapura Memperlakukan Agama” dalam Detikforum, Politik dan Peristiwa Sosial Budaya, 13 Agustus 2014. Diakses dari <http://forum.detik.com/belajar-dari-cara-singapore-memperlakukan-agama-t1001623.html>

Straits Times, Singapore, 15 September 1989.

Lee Kuan Yew School of Public Policy, Public Housing in Singapore: Examining Fundamental Shifts, <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/public-housing-in-singapore.pdf>; Ng Kok Hoe, Public housing policy in Singapore, Global is Asian, [file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/public-housing-policy-in-singapore_with-graphics\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/public-housing-policy-in-singapore_with-graphics(1).pdf)

Detikforum, Politik dan Peristiwa Sosial Budaya, “Belajar dari Cara Singapura Memperlakukan Agama”, 13 Agustus 2014. Diakses dari <http://forum.detik.com/belajar-dari-cara-singapore-memperlakukan-agama-t1001623.html>

Human Right Watch, Country Summary, Singapore, January 2009, diakses tanggal 19 Maret 2018 dari http://www.hrw.org/sites/default/files/relate_material/Singapore; Amnesty International Report 2009, May 2009 <http://www.amnesti.org>

Islam Online-net, “Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore”, <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013.

Report of the Constitutional Commission, 1966 (Chairman: Wee Chong Jin), Singapore: Printed by the Government Printer, 1966), OCLC51640681. Para.38.

<https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/07/24/pcdlcg384-banyakmuslim-muda-singapura-tertarik-berhaji>, diakses tanggal 10 September 2018.

<https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/03/17/o45ygv313-sumbangan-wajibmuslim-singapura-alami-kenaikan>, diakses tanggal 10 September 2018.

<https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/09/09/nuddn3313-muslim-singapurasalurkan-2-ton-beras-untuk-dhuafa-di-aceh>,

<https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/14/10/07/nd1mx9-muslim-singapura-pilih-salurkan-daging-kurban-ke-luar-negeri>, diakses tanggal 10 September 2018.

<https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/04/29/mm097i-geliat-zakat-disingapura-meningkat>, diakses tanggal 10 September 2018.

<https://www.indosecuritysystem.com/read/cctv/2016/04/13/193/singapura-tangkal-terorisme-dengan-kamera-cctv-dan-menerapkan-erp>.

Singapore Forecast: Nominal GDP Per Capita (1980-2019), [www-ceicdata-com.cda.ampproject.org](http://www-ceicdata.com.cda.ampproject.org). Diakses pada 22 November 2019.

Pidato Goh Chok Tong pada di Parlemen Singapura pada 5 April 2002, diakses dari <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>, pada September 2005.

Pidato Goh Chok Tong pada National Day Rally, 2002, diakses dari <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002081805htm>

Pidato Goh Chok Tong pada National Day Rally, 2002, diakses dari <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002031703.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura pada Sesi Dialog Bersama Pemimpin Masyarakat Mengeni Penangkapan anggota Jama'ah Islamiyah, 14 Oktober 2002, di Panggung Kallang, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002101405.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong pada Acara 40 tahun Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002112704.htm>

Teks pidato Lee Hsien Loong, Wakil Perdana Menteri Singapura di Forum Peringkat Menteri Kent Ridge 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002093001.htm>

Teks Sambutan Khaw Boon Wan, pada Persidangan Singapura, 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002100301.htm>

Teks sambutan Lee Hsien Loong, saat mejadi Wakil Perdana Menteri Singapura pada Forum Fortune Global 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002111301.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Pembahasan Parlemen mengenai Putusan Presiden Singapura, 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada National Day Rally 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002081805.htm>

Teks Sambutan Lee Hsien Loong, Wakil PM Singapura, berjudul Developments in Southeast Asia: Singapore's Perspective, di Nomura Securities Singapore Seminar 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002101701.htm>

Teks Sambutan Lee Hsien Loong, Waki PM Singapura pada Forum Peringkat Menteri Kent Ridge 2002 di 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002093001.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Sesi Dialog Bersama Pemimpin dan Anggota Kesatuan Sekerja dan Para Majikan, 2001 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2001101403.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong, Perdana Menteri Singapura di Parlemen mengenai Utusan Presiden Singapura, 2002 di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

Teks Sambutan Goh Chok Tong, PM Singapore pada Pembahasan Parlemen mengenai Putusan Presiden Singapura, 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/pr/2002040501.htm>

Ministry of Home Affairs, the White Paper: The Jemaah Islamiyah Arrest and the Threat of Terrorism, 2003.

Teks pidato Dr. Yacob Ibrahim, Menteri Pembangunan Masyarakat & Sukan Singapura pada Hari Badan Antara Agama (IRO), 2002, di <http://app10.internet.gov.sg/data/sprinter/2002031703.htm>